



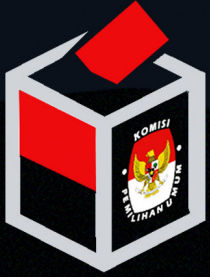
● TABLOID

REFERENSI PEMILU 2024 ●

# info indonesia

MINGGU V JANUARI 2024

HARGA, @ Rp 20.000,-



Road to  
Election  
2024

## PRESIDEN RI NETRAL, JOKOWI DUKUNG 02

ANGGARAN PEMILU 2024  
MENCAPAI RP 71,3 TRILIUN

YAKIN AMIN MENANG  
BESAR, WONG SUMSEL  
BUTUH PERUBAHAN

BOLEH PINTAR  
JANGAN  
MENGAKU  
PINTAR

PAN MAKIN  
JOKOWI  
BANGET

CAPRES  
JANGAN  
BANYAK  
GIMIK

DEMOKRAT  
BARU DIAKUI  
JOKOWI

MENANG SATU  
ATAU DUA  
PUTARAN TIDAK  
ADA BEDANYA



PRESIDEN BOLEH  
KAMPANYE  
BAWASLU WANTI-  
WANTI JOKOWI



“Pak Jokowi ini seperti meruntuhkan banyak hal yang berhubungan dengan demokrasi. Dia mempromosikan dinasti politik yang meruntuhkan gerakan anti nepotisme, membuat KPK lumpuh, sekarang pemilu menuju ke arah yang terburuk sepanjang reformasi”

*Ray Rangkuti*



## Kecurangan

Situasi politik menjelang Pemilu 2024 terasa cukup cepat perubahannya. Hari ini mendukung siapa, besok berubah lagi dukungannya. Hari ini mengkritik habis-habisan, besoknya memuji setinggi langit. Tuduhan-tuduhan juga banyak dimainkan agar bisa menjatuhkan mental lawan dan mengubah pendirian pemilih.

Terkait tuduhan dengan maksud menjatuhkan lawan, semua dimainkan para kandidat untuk menutupi sisi lemah mereka. Peran media sosial juga sangat berpengaruh karena dinilai sebagai cara paling efektif untuk menyampaikan maksud dan tujuan.

Soal benar atau tidak belakangan, yang penting menjatuhkan mental lawan dulu. Kini kita mulai terjebak dengan narasi-narasi menyesatkan, namun terkemas dalam suatu pembenaran. Sehingga masyarakat juga terpengaruh dan meyakini kalau itu memang benar adanya, padahal salah.

Diksi-diksi menyesatkan ini banyak mewarnai politik Indonesia menjelang pemilihan presiden. Saat menyerang lawan, mereka juga memainkan perasaan kalau menjadi korban kecurangan dan kezaliman.

Semua pasangan calon presiden mengaku kalau mereka menjadi korban kecurangan dan ketidakadilan, baik yang dilakukan sesama pesaing, penyelenggara maupun pemerintah.

Sebagian fakta itu memang benar, seperti sikap kenetralan pemerintah dan penyelenggara Pemilu, namun sebagian lagi juga tidak benar.

Meski semua mengaku jadi korban kecurangan, namun kita semua sesungguhnya bisa melihat sendiri siapa yang melakukannya.

Di sisi lain, hiruk pikuk pilpres berbanding jauh dengan pemilihan legislatif yang terlihat senyap, meski spanduk-spanduk peserta pemilu bertebaran di jalan-jalan, pohon, tiang listrik, tembok rumah, pagar, bahkan di tempat pemakaman.

Sebagian ada yang memang turun ke masyarakat untuk menyapa dan mengenalkan diri mereka. Upaya para caleg yang turun langsung ini patut diapresiasi karena ada usaha untuk meraih tujuan.

Namun, ada sebagian atau bahkan sebagian besar yang hanya memanfaatkan cara instan, yakni politik uang. Cukup memberi uang ke masyarakat agar memilih mereka, maka bisa terpilih. Soal program yang ditawarkan, itu urusan belakangan, karena sudah sama-sama lupa.

Maka, jangan heran banyak wakil kita yang duduk di parlemen tidak dikenal. Sehingga tidak ada hubungan emosional yang terbangun antara rakyat dengan wakilnya di parlemen. Inilah dampak buruk dari politik uang yang selama ini banyak dilakukan.

Beberapa hasil survei menyebutkan, kecurangan Pemilu 2024 masih tinggi sekali, yakni mencapai 76 persen.

Sementara, tingkat pengenalan masyarakat pada wakil rakyat yang akan mereka pilih sangat kecil, tidak lebih dari 2 persen. Selama ini yang datang mengetuk pintu mereka bukan caleg tapi amplop berisi uang.

Politik transaksional masih berlaku kental di masyarakat. Sehingga jangan heran jika nantinya tidak mendapat wakil rakyat yang berkualitas serta membela kepentingan orang banyak.

Namun tidak juga bisa saling menyalahkan karena semua saling membutuhkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari cara bagaimana politik transaksional ini bisa dikurangi. Selamat membaca!!! ●



**info indonesia** INOVASI UNTUK NEGERI

INFOINDONESIA.ID adalah media massa cetak di bawah payung PT. DUA SATU PRO  
Sertifikat Dewan Pers  
Nomor 969/DP-Verifikasi/K/III/2022

**PENDIRI/ DIREKTUR :** Usman Rizal

**PEMIMPIN PERUSAHAAN:** Adam Aulia Manzal Khan **PEMIMPIN REDAKSI:** Rusdiyono **WAKIL PIMPINAN REDAKSI:** Rahmad Romli

**REDAKTUR PELAKSANA:** Irmayani **REDAKTUR:** Rio Taufiq Adam, Fonda Lapod, Rusdy Setiawan Putra, Irmayani, Rusdiyono, Nina Erlina **REPORTER:** Nefri, Indra Hadi, Pahmi Ramadhan, Moehamad Moeslim, Sadam M, Hardi Aar, Reno, Aldi Rinaldi, M. Iqbal, Andyanto, M. Yadhi, Muhammad Fiqri, Muhammad Khaidir **EDITOR & GRAFIS:** Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali

**KEUANGAN :** Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI:** Nur Aisah **PENGEMBANGAN BISNIS:** M. Iqbal, Zul Fahmi **ADMINISTRASI:** Ega Tri Gustina **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar

**HARGA IKLAN:** 1 Halaman ukuran 290 mm x 420 mm Rp.25.000.000,-include PPN 11 %.  
1/2 Halaman ukuran 145 mm x 210 mm Rp. 12.500.000,-

**BANK ACCOUNT:** \*A/N : PT. DUA SATU PRO, BCA: No.Rek: 5530682121 KCP Otista Jakarta Timur **ALAMAT REDAKSI/IKLAN/**

**PEMASARAN:** Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750 **TELP** 021-791 96781 **FAX** 021-791 96786 **PALEMBANG** Jalan Puncak Sekuning Lorong Sahabat No 2 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I

Palembang 30126 **TELP :** 0711-7442344





“Seperti kata Pak Anies bahwa debat bukan cerdas cermat yang harus belajar, tetapi persiapan dirinya dalam menghadapi debat ini telah dilakukan sejak bertahun-tahun”

Iwan Taringan

# ANIES PRESIDEN DI MEDIA SOSIAL

**Dukungan untuk calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, di media sosial terus bermunculan. Platform X menjadi tempat bermunculannya dukungan untuk Anies dan Muhaimin Iskandar.**

Salah satunya yang membuat heboh adalah munculnya fans account ala-ala artis K-Pop dengan username @aniesbubble. Bagi fans K-Pop tentu tidak asing dengan istilah Bubble. Bagi yang baru pertama kali mendengar, Bubble adalah layanan berbayar yang biasanya digunakan oleh penggemar K-pop untuk menerima dan mengirim pesan kepada idola kesukaannya, baik itu dalam bentuk teks, foto, maupun video.

Akun X @aniesbubble ini muncul setelah Anies melakukan live TikTok untuk pertama kali. Akun ini kemudian mulai membagikan kalimat bijak, foto-foto, dan potongan video Anies yang dibuat ala akun penggemar K-pop.

Akun @aniesbubble ini juga membuat ikon khusus untuk Anies Baswedan, yakni burung hantu. Dengan emoji burung hantu yang melekat pada Anies Baswedan, kini paslon nomor urut satu itu dipanggil dengan sebutan “owl ahjussi” dan “uri owl”. Tentunya panggilan itu sangat melekat dengan kalangan penggemar K-pop.

Contohnya, seperti perkataan yang diucapkan oleh Anies Baswedan kembali dituliskan di akun tersebut menggunakan hangul dalam bahasa Korea. Nama Korea Anies: Park Anh Nice

Akun ini kemudian memantik munculnya postingan tentang Anies dengan nuansa ala idol K-Pop. Mulai netizen yang ingin memberi nama AU alias Alternate Universe untuk Anies sampai merchandise.

Nama Korea untuk Mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah Park Ahn Nice. Nama Park Ahn Nice itu pertama kali dicetuskan akun X @HyoJinho dalam ungahan promosi Photobooth dengan modelnya adalah Anies. “Mohon maaf nama AU nya Park Ahn Nice ciptaan gue trending gue mau pamer,” tulis @HyoJinho.

Pada saat debat Pilpres 2024 berlangsung pada 7 Januari 2024, komunitas K-Pop pendukung Anies ini menaikan dua tagar, yakni #Anies2ndStage dan #HwaitingAbahAnies.

#Anies2ndStage sebagai tanda bahwa ini merupakan debat kedua Anies di Pilpres 2024. Sedangkan, #HwaitingAbahAnies merupakan dukungan kepada Anies agar semangat di debat capres kedua.

Selain dukungan yang berkaitan dengan K-Pop, dukungan untuk AMIN juga ada

yang berupa dukungan spiritual. Di mana para pendukung pasangan AMIN ini memposting nazarnya di X dengan tagar nazar pemilu.

Tagar nazar pemilu ini bahkan sempat menjadi trending topik Twitter dengan hampir 300 ribu postingan terkait nazar pemilu. Nazar Pemilu ini didominasi pendukung pasangan AMIN.

“Mereka menganggap pemilihan kali ini berbeda dan menarik karena pendukung pasangan calon tidak hanya berjanji, tetapi juga siap untuk melaksanakan janji tersebut jika pasangan calon yang mereka dukung menang,” kata Founder Drone Empirit, Ismail Fahmi.

Pada analisisnya, Fahmi mencatat tagar nazar pemilu digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan harapan dan dukungan terhadap pasangan calon tertentu. Terdapat variasi dalam jenis nazar yang dibuat oleh pengguna media sosial.

“Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki minat dan keahlian yang beragam, serta ingin berkontribusi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, riset, pemberdayaan UMKM, dan keagamaan,” ujar dia.

Debat Kelima

Debat capres kelima tinggal hitungan hari. Seluruh capres kini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi debat yang akan berlangsung pada 4 Februari 2024.

Anies mengatakan dirinya akan memanfaatkan momentum debat capres terakhir untuk menyampaikan visi-misi. Anies menegaskan dirinya sangat siap menghadapi debat capres kelima.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga tengah melakukan berbagai macam persiapan untuk tampil pada debat terakhir. Anies menuturkan, dirinya sudah sangat memahami tema yang diangkat pada debat kelima terkait kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

“Saya rasa ini sebuah kesempatan bagi kami. Kami akan menyampaikan visi-misi sesuai dengan tema tersebut. Insya Allah kami siap,” kata Anies di Lapangan Purnawarman, Kabupaten Purwakarta, Minggu, 28 Januari 2024.

Di samping itu, Anies mengaku juga mendapatkan usulan dari masyarakat untuk tampil beda pada debat capres terakhir. Setidaknya menggunakan kostum yang berbeda dengan capres lainnya, sehingga menimbulkan daya tarik tersendiri bagi masyarakat terhadap dirinya.

“Lihat nanti saja, kami pakai kostum apa,” katanya.

Yang terpenting, kata Anies, dirinya fokus terhadap substansi debat. Terkait permintaan untuk tampil beda di debat capres terakhir, Anies akan berdiskusi dengan tim. Jika dirasa perlu, Anies akan meminta kepada tim mempersiapkan

kostum yang unik. Sehingga, nantinya akan menampilkan yang berbeda untuk masyarakat Indonesia.

“Kami itu mendorong substansi, karena kami yakin kalau substansinya baik itu pendukung aja (kostum/outfit). Tapi kita lihat, kalau memang dianggap perlu kita lakukan. Kalau enggak ya kita pakai seperti yang biasanya,” jelasnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menegaskan akan memanfaatkan momentum debat capres ini untuk beradu gagasan dengan para kompetitor. Anies menambahkan, materi debat capres akan dimatangkan. Sehingga, penampilannya bisa memberi keyakinan kepada masyarakat.

Juru Bicara Tim Nasional AMIN, Muh Ridho Ramli Rahim, mengklaim, Anies sangat memahami tema debat terakhir. Namun, Anies tetap memperdalam materi-materi debat.

Timnas AMIN juga selalu memberi masukan kepada Anies ataupun Muhaimin. Selain itu, Anies juga kerap mendiskusikan beberapa materi debat dengan tim.

Juru Bicara Timnas AMIN lainnya, Iwan Taringan, mengatakan, Anies sudah mendiskusikan materi-materi debat

dengan tim dan para pakar. Tidak kalah penting, Anies tetap menjaga kesehatan badannya.

“Debat kelima seperti biasa Pak Anies akan persiapan dengan fisik yang bugar dan diskusi dengan tim pakar tentunya,” katanya, Selasa, 30 Januari 2024.

Iwan menganalogikan debat capres tidak dapat disamakan dengan cerdas cermat. Sebab, debat capres merupakan ajang seluruh kontestan saling menguji isi kepalanya.

“Seperti kata Pak Anies bahwa debat bukan cerdas cermat yang harus belajar, tetapi persiapan dirinya dalam menghadapi debat ini telah dilakukan sejak bertahun-tahun,” ujarnya.

Iwan menambahkan, Anies memiliki bukti empiris mengenai materi debat. Iwan mengatakan tema debat yang diangkat kali ini akan sangat menguntungkan Anies karena memiliki segun pengalaman, mulai dari akademisi, gubernur, hingga menteri.

Menurut Iwan, dengan segudang pengalaman yang dimiliki, Anies akan dengan mudah dan mendominasi jalannya debat capres terakhir. Terkait tema pendidikan, Anies diprediksi akan melibas capres lain. Sebab, isu pendidikan akan sangat menguntungkan Anies.

Apalagi, dia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden Jokowi dan Rektor Universitas Paramadina. ●RDO





“Ya keberpihakan kan sudah sangat jelas, semenjak Gibran dijadikan cawapres, sudah pasti Jokowi ke pasangan 02, pasangan Prabowo-Gibran”

Efriza



# PRABOWO REAL PRESIDEN 2024

**Sikap politik Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024 terjawab lewat pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan ini menyatakan bahwa ia bersama Gibran Rakabuming Raka serta Koalisi Indonesia Maju (KIM) adalah bagian dari tim Presiden Jokowi.**

Prabowo pun menyinggung ketika dirinya menjadi lawan politik Presiden Jokowi di dua kali pilpres sebelumnya pada 2014 dan 2019. Kendati begitu, Prabowo kini tidak malu-malu lagi untuk mengungkapkan bahwa dirinya merupakan tim Presiden Jokowi.

“Prabowo-Gibran serta koalisi Indonesia maju, kami terang-terangan dan tidak malu-malu dan tidak mencla-men-cle. Kami adalah timnya Pak Joko Widodo dan Anda tahu saya sekian tahun adalah lawan Pak Jokowi. Dua kali saya kalah (dari Jokowi),” kata Prabowo.

Prabowo mengungkapkan bahwa ia mendapatkan sudut pandang berbeda dari sebelumnya menjadi rival Jokowi setelah ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan. Ia menyebut Jokowi memiliki sejumlah program dan strategi hebat dalam membangun Indonesia.

Prabowo menyatakan selama dirinya masuk ke dalam kabinet pemerintahan, dia melihat persepsi yang berbeda terhadap Presiden Jokowi. Kata Prabowo, Presiden Jokowi sangat mencintai rakyatnya. Bahkan, program yang diinisiasi pemerintahan itu sangat membantu masyarakat.

Disamping itu, Prabowo menegaskan, dirinya bersama Gibran Rakabuming Raka berkomitmen

untuk melanjutkan program pemerintahan Presiden Jokowi yang belum tuntas. Tidak hanya itu, pasangan Prabowo-Gibran juga akan melanjutkan program strategis nasional (PSN), salah satunya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Saya bekerja, saya lihat dari dekat, saya lihat strategi dan program-program beliau ternyata sama dengan pemikiran-pemikiran saya. Karena itu saya komitmen, saya siap melanjutkan semua program dan strategi beliau,” ucap Prabowo.

Prabowo mengaku juga mengadopsi beberapa program dari pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, program yang dimiliki pemerintahan Presiden Jokowi saat ini dipercaya bisa membawa Indonesia lebih baik.

“Program dan strategi kita adalah yang paling masuk akal, paling logis,” kata Prabowo.

Mantan Danjen Kopasus itu juga menyinggung soal program hilirisasi di mana pemerintah berusaha menjadikan komoditas mentah menjadi barang jadi untuk menciptakan nilai tambah.

“Tidak ada pengusaha di dunia yang mau jual dagangan dengan harga yang minim. Masuk akal enggak kekayaan kita, kita jual ke bangsa asing dengan harga minimal? Masuk akal. Kita mau mengolah kekayaan kita di bumi Indonesia,” ujar Prabowo.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran semakin pede Presiden Jokowi akan memberikan dukungannya kepada pasangan calon 02. Hal tersebut semakin terlihat ketika Presiden Jokowi dan Prabowo melangsungkan makan siang bersama di Magelang. Selain itu, Presiden Jokowi dan Prabowo juga sempat bertemu di beberapa kesempatan.

“Ya dampaknya Alhamdulillah makin meyakinkan pemilihan Bapak Jokowi memang pilihannya adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran,” ujar Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024.

Nusron berharap Presiden Jokowi dapat memberikan dukungan penuh terhadap Prabowo-Gibran. Pun dia berharap, Presiden Jokowi mencoblos Prabowo-Gibran.

“Insyaallah moga-moga,” kata Nusron Wahid.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan bahwa kini ada yang sedang membangun narasi Prabowo tidak dapat mewakili Presiden Jokowi ataupun sebaliknya. Namun hal tersebut langsung terbantahkan dengan kedekatan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo.

“Karena masih ada pihak-pihak yang mencoba klaim bahwa Prabowo bukan Jokowi, Jokowi bukan Prabowo,” ujar

Nusron.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Fanta Prabowo-Gibran, Dedek Prayudi, menilai, Presiden Jokowi merupakan bagian dari pendukung 02 di Pilpres 2024.

Dedek menyampaikan dukungan yang diberikan Presiden Jokowi bukan semata ingin melanggengkan kekuasaan, akan tetapi untuk melanjutkan pembangunan, khususnya pembangunan strategis nasional.

“Sebenarnya ini sudah gestur yang sangat tebal bahwa Pak Joko Widodo sebagai insan politik, bukan sebagai presiden yang sedang menggunakan kewenangannya, mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini bukan soal melanjutkan kekuasaan, ini adalah soal pembangunan yang berkelanjutan,” kata Dedek di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin, 29 Januari 2024.

Menurut Dedek, Jokowi menginginkan kerja-kerja baik selama ini dapat dilanjutkan oleh penerusnya. Ia menyebut Jokowi menganggap bahwa Prabowo-Gibran adalah orang yang paling tepat untuk melanjutkan kerja-kerja tersebut.

“Kemarin gestur tersebut dipertebal lagi dengan makan-makan sama Mas AHY yang (merupakan) bagian dari Koalisi Indonesia Maju. (Dan) sebelum (dengan) Mas AHY, dengan ketua umum saya (PSI), Mas Kaesang juga makan-makan,” tutur Dedek.

Ia yakin pertemuan itu meningkatkan elektabilitas Prabowo-Gibran. Dia juga mengklaim bahwa saat ini tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih tinggi.

“Kami percaya dengan approval rate Pak Jokowi yang begitu tinggi, apabila dis-

and-  
ingkan  
dengan  
asosiasi  
politik  
di  
antara  
Pak  
Prabowo  
dan  
Pak  
Jokowi,  
akan  
berdampak  
positif  
terhadap  
elektabilitas  
Prabowo-Gi-  
bran,” kata Dedek.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menilai, isu soal presiden boleh berkampanye atau memihak semakin menguatkan indikasi bahwa Presiden Jokowi berpihak kepada pasangan Prabowo-Gibran.

“Artinya kan sudah jelas bahwa keberpihakan dukungan Jokowi itu ke Prabowo-Gibran,” kata Ujang.

Ujang mengatakan keberpihakan Presiden Jokowi itu sudah terlihat ketika anaknya, Gibran Rakabuming Raka, resmi diumumkan sebagai cawapres Prabowo Subianto.

“Ya keberpihakan kan sudah sangat jelas, semenjak Gibran dijadikan cawapres, sudah pasti Jokowi ke pasangan 02, pasangan Prabowo-Gibran,” tutupnya. ●RDO







“Saya melihat Pak Jokowi ini kan makin sering di Jateng, jadi itu saya melihat dia ini all out untuk mengalahkan banteng di kandang banteng”

Jamiluddin Ritonga

# GANJAR JAGA KANDANG BANTENG

**Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, harus berupaya sekuat tenaga untuk mengamankan wilayah Jawa Tengah yang merupakan lumbung suara bagi PDIP. Presiden Jokowi dan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kini tengah mengincar wilayah itu untuk memenangkan Pilpres 2024.**

**T**erkait strategi akan yang digunakan untuk mengamankan suara di Jawa Tengah, Ganjar enggan untuk membeberkannya. Yang jelas, kata Ganjar, pihaknya akan mengamankan suara di Kandang Banteng.

“Ya, masa strategi saya omongin sama kamu, dia tahu dong. Kita pasti akan bekerja keras karena itu Kandang Banteng,” kata Ganjar di Istana Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 28 Januari 2024.

Ganjar juga menyinggung soal calon presiden lainnya yang kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Prabowo -Gibran dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) pernah berkunjung beberapa kali ke Jawa Tengah untuk berkampanye.

“Maka banyak yang akhirnya mungkin harus membuat cara-cara tersendiri, makanya yang lain kok banyak dan sering datang ke Jawa Tengah kan,” ungkapnya.

Di lokasi yang berbeda, Ganjar mengakui bahwa Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pemilih yang sangat besar. Maka dari itu, sangat wajar bilang pasangan calon presiden dan wakil presiden berusaha untuk mendapatkan suara di Jawa Tengah.

“Oiya, kita sadar betul kok Jateng itu seksi untuk diambil suaranya,” kata Ganjar di sela menghadiri Hajatan Rakyat di Kulon Progo, Yogyakarta, Minggu, 28 Januari 2024.

Meski demikian, suara di Jawa Tengah dapat ia amankan. Mantan Gubernur Jawa Tengah menyakini suara di wilayahnya akan mengalir ke pasangan Ganjar-Mahfud serta PDIP. Dia mengatakan, PDIP memiliki basis pendukung dan suara yang sangat kuat di Jawa Tengah.

“Jateng ini kan kandang banteng, cukup kokoh, pasti orang ingin mengambil banteng-bantengnya begitu,” katanya.

Mantan Anggota DPR RI itu mengungkapkan, pihaknya akan terus bergerak demi mengamankan suaranya di Jawa Tengah. Dalam mengamankan suara di Jawa Tengah, Ganjar meminta kepada seluruh relawan, simpatisan, serta kader PDIP untuk turun ke masyarakat.

“Tentu saja semua kan sudah bergerak sekarang, kalau di internal kami ada namanya kekuatan tiga pilar,” jelasnya.

Maksud tiga pilar itu, Ganjar menjelaskan, merupakan struktural dari legislatif dan eksekutif. Kendati begitu, dukungan yang diberikan eksekutif, Ganjar meminta untuk tetap menahan diri dan tetap menjalankan tugasnya.

Ganjar pun menyoroti dukungan yang diberikan oleh para eksekutif. Menurutnya, situasi saat ini para eksekutif sangat terdesak, karena tidak dapat memberikan dukungan secara penuh. Sebab, undang-undang membatasi itu.

“Tiga pilar itu ada di struktural, legislatif dan eksekutif, nah memang kalau sudah bicara eksekutif kita hati-hati, dulu kami betul-betul menahan diri. Tapi hari ini rasanya mereka semua mengalami pada situasi kuldesak, seperti terjebak begitu ya,” ujarnya.

Ganjar pun tidak memaksakan kehendaknya kepada para eksekutif untuk memberikan dukungannya. Oleh karena itu, Ganjar mendorong, jika eksekutif ingin turun langsung ke masyarakat atau berkampanye untuk terlebih dahulu mengajukan cuti.

“Karena satu sisi kemarin (eksekutif) disuruh netral, tapi pada satu sisi lain boleh, maka saya hanya meminta kepada kader-kader yang di eksekutif gunakan aturan kalau mau ikut dalam kampanye, cutilah,” jelasnya.

Ganjar mengatakan eksekutif yang ingin memberikan dukungan kepada pasangan Ganjar -Mahfud untuk mengajukan cuti. Sebab, peraturan perundang-undangan menyatakan hal demikian. Jadi jangan sampai, dukungan yang diberikan para eksekutif malah berujung pada pelanggaran Pemilu.

“Karena cara itu yang paling benar dan tidak melanggar aturan,” katanya.

Ganjar menegaskan kembali bahwa pemilihan PDIP di Jawa Tengah kini bergerak cukup masif diikuti dengan partai pendukung lainnya. Sehingga, para simpatisan dan relawan memiliki semangat dan spirit untuk mengamankan suara. Apalagi, para simpatisan dan relawan yang mengetahui secara jelas kondisi di lapangan.

“Kalau bahasanya Mbak Yenny (Wahid, putri Gus Dur), selamatkan demokrasi, nah mereka bangkit. Termasuk civil society di Jakarta juga menyampaikan itu,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Puan

Maharani, menegaskan, partainya akan berjuang sekuat tenaga untuk mengamankan suara di Jawa Tengah. Kata Puan, seluruh elite politik sudah mengetahui dengan jelas bahwa Jawa Tengah merupakan kandang banteng. Sehingga, elite atau paslon yang ingin merebut suara di Jawa Tengah akan mengalami kesulitan.

Di satu sisi, masyarakat di Jawa Tengah memiliki loyalitas yang sangat tinggi terhadap partai. Selain itu, kebanyakan warga Jawa Tengah memilih Ganjar -Mahfud sebagai presiden dan wakil presiden.

“Targetnya, ya, Jawa Tengah tetap merupakan ‘kandang banteng’. Rakyat pasti punya pilihannya,” kata Puan saat melakukan kunjungan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa, 30 Januari 2024.

Terkait dengan Jokowi effect dan pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang akan memberi kejutan di Jawa Tengah, Puan menyerahkannya kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

“Biar rakyat yang menilai. Kita lihat Jateng akan memilih pemimpinnya dan akan memilih siapa yang akan dipilih. Rakyat pasti sudah punya pilihan yang terbaik dan terbaik untuk Jawa Tengah,” tutupnya.

Analisis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai, Presiden Jokowi ingin mengalahkan PDIP di Jawa Tengah dengan sering berada di wilayah tersebut. Terlebih, presiden dua periode itu tampak mesra makan bakso bersama Prabowo Subianto di Magelang.

Jamiluddin mengatakan pertemuan Jokowi dengan Prabowo di Jateng itu menyiratkan bahwa dirinya unggul di Jateng. “Jokowi ini mempertaruhkan dirinya bahwa dia lebih baik dan unggul di Jateng daripada Ganjar Pranowo atau PDIP,” kata Jamiluddin, Senin, 29 Januari 2024.

Mantan Dekan Fakultas FISIP IISIP ini menambahkan Jokowi lebih sering di Jawa Tengah karena sedang ingin mengalahkan banteng di Jawa Tengah.

“Saya melihat Pak Jokowi ini kan makin sering di Jateng, jadi itu saya melihat dia ini all out untuk mengalahkan banteng di kandang banteng. Jadi ada upaya kesengajaan, saya pikir itu,” ujarnya.

•RDO





“Kalau Amin menang, kami lakukan evaluasi total agar masa depan bangsa dan anak cucu kita terjamin selamanya”

*Muhaimin Iskandar*



# CAK IMIN TANTANG LUHUT

**Tensi politik jelang 14 Februari 2024 makin memanas. Pascadebat capres keempat, calon wakil presiden nomor urut 01, Muhaimin Iskandar, terlibat perang urat saraf dengan pendukung paslon 02, salah satunya Luhut Binsar Pandjaitan.**

**H**al ini bermula dari Cak Imin yang menyoroti banyakna tenaga kerja asing pada proyek hilirisasi. Dengan banyaknya tenaga kerja asing, tidak akan memberikan kesejahteraan bagi rakyat yang tinggal di sekitar proyek hilirisasi tambang.

Cak Imin menyoroti pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah yang berbanding terbalik dengan kesejahteraan masyarakatnya.

“Sulteng pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut,” katanya.

Wakil Ketua DPR RI itu menuturkan bahwa keuntungan dari proyek tambang itu hanya dinikmati segelintir orang. “Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batubara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek,” tegasnya.

Atas pendangannya terhadap

proyek hilirisasi itu, Cak Imin mendapatkan pertentangan dari Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi di Kabinet Presiden Joko Widodo.

Kendati begitu, Cak Imin akan membuktikan kepada Luhut terkait dengan proyek hilirisasi yang memang hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu. Cak Imin pun meminta bukti kepada Luhut terkait besaran keuntungan yang diterima negara atas proyek hilirisasi yang sudah dilakukan Indonesia.

Bahkan, kata Cak Imin, proyek hilirisasi yang selama ini dilakukan lebih banyak mudaratnya. Banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat proyek hilirisasi.

“Ya kita buktikan, kita buktikan. Bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya,” katanya.

Cak Imin menegaskan bahwa dirinya siap membuktikan pada Luhut terkait banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi karena hilirisasi. “Siap saja. Kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya,” imbuhnya.

Tidak sampai di situ, Cak Imin bersama Co-Captain Timnas AMIN, Thomas Lembong, juga akan membuktikannya kepada Luhut. “Saya dan Pak Tom lagi siap-siap ngadepin opung,” katanya.

Cak Imin menegaskan, jika dirinya dan Anies Baswedan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024-2029,

maka akan mengevaluasi secara total hilirisasi tambang yang banyak merugikan

ugikan masyarakat.

“Kalau Amin menang, kami lakukan evaluasi total agar masa depan bangsa dan anak cucu kita terjamin selamanya,” ucapnya.

Cak Imin mengatakan bahwa Indonesia harus menjadi produsen dari bahan matang dari hasil-hasil tambang. Cak Imin juga akan menyetop ekspor nikel.

Untuk menginisiasi itu semua, kata Cak Imin, maka dibutuhkan perubahan besar-besaran dan keberanian agar Indonesia lebih baik lagi.

“Karena itu perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan yang memberi manfaat keadilan antargenerasi,” katanya.

Luhut sendiri membantah pernyataan Cak Imin soal hilirisasi tambang ugalkan. Dia menantang Cak Imin untuk berkunjung ke Weda Bay, Maluku Utara, dan Morowali, Sulawesi Tengah, untuk melihat dampak ekonomi dari hilirisasi.

“Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin tuh berkunjung ke Weda Bay, ke Morowali, untuk lihat sendiri seeing is believing,” ujar Luhut dalam akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Rabu, 24 Januari 2024.

Kata Luhut, Cak Imin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat kepada publik untuk mencapai suatu posisi.

“Menurut saya itu satu karakter yang tidak bagus untuk mencapai suatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi,” ucap Luhut.

Dia pun membeberkan data kemiskinan di dua daerah hilirisasi tersebut menurun pada 2023. Data angka kemiskina 2015 di Weda Bay mencapai 14,7 persen. Sementara pada 2023, angka itu turun 12,4 persen.

Sementara di Morowali, angka

kemiskinan 2015 sebesar 15,8 persen. Sedangkan pada 2023, turun menjadi 12,3 persen.

Luhut menjelaskan, pemerintah juga mendirikan politeknik di Sulawesi dengan guru yang berkelas dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI).

“Mereka langsung praktek di industrinya. Malah ada yang dikirim ke China untuk belajar teknologi dan mereka sekarang bekerja menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi,” ungkap Luhut.

Luhut juga angkat bicara terkait Tom Lembong yang sebut harga nikel akan anjlok karena hilirisasi yang ugalkan. Luhut pun meragukan intelektualitas Tom Lembong.

“Bagaimana bisa Anda memberikan advice bohong kepada calon pemimpin yang anda dukung. Saya sedih melihat Anda di situ, artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi meragukan,” tulisnya.

Luhut mengatakan, Tom Lembong perlu melihat pergerakan harga komoditas nikel yang naik-turun selama 10 tahun terakhir.

“Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, kan Anda pebisnis juga. Siklus dari komoditi itu kan naik-turun apakah itu batu bara, nikel, timah atau emas,” cetus Luhut.

Karena itu, Luhut melihat mantan Kepala BKPM itu memiliki karakter tidak bagus. Luhut juga menantang balik Cak Imin terkait adu data hilirisasi yang dinilai ugalkan.

Luhut menantang Cak Imin untuk menghubungi dirinya sebagai tindak lanjut. “Kalau dia bilang Muhaimin mau minta ketemu saya, dia ada nomor telepon saya, telepon saja kapanya?” ujarnya.

Luhut juga siap mengajak Cak Imin untuk melakukan pengecekan hasil hilirisasi nikel di Morowali dan Weda Bay.

“Jangan cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya terus berkomentar seperti yang bilang ugalkan ya sudah pergi saja sana dia,” katanya. ●RDO







“Sosok Gibran yang awalnya banyak pihak underestimate, tetapi ternyata mampu membuktikan kapasitas dan kualitasnya”

Subiran Paridamos

# GIBRAN MAKIN CEMERLANG PRABOWO BAKAL MENANG

**Gibran Rakabuming Raka masih menjadi sorotan dalam pertaruangannya di Pilpres 2024. Calon wakil presiden nomor urut 02 ini dinilai memberikan tren positif terhadap Prabowo Subianto untuk bisa menjadi presiden 2024-2029.**

**D**irektur Eksekutif Sentral Politik, Subiran Paridamos, mengatakan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto mengalami tren yang sangat positif. Sejak menjadi cawapres, elektabilitasnya terus mengalami kenaikan yang sangat drastis.

Keberadaan Gibran juga memberikan daya tarik bagi pasangan nomor urut 02 itu. Subiran mengatakan para simpatisan Presiden Jokowi yang sempat terbelah kini sudah mulai merapatkan barisan untuk mendukung pencalonan Prabowo-Gibran.

“Loyalis Jokowi yang berada di kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin terus melakukan migrasi,” katanya kepada Info Indonesia, Senin, 29 Januari 2024.

Subiran menyampaikan, loyalis Jokowi yang migrasi itu salah satu sebabnya adalah sikap dan perilaku politik Presiden Jokowi akhir-akhir ini ditafsirkan pendukungnya total mendukung Prabowo-Gibran. Misalnya saja seperti makan malam Jokowi dan Prabowo beberapa waktu lalu dan komentar Jokowi terhadap debat capres ketiga yang menyinggung soal serangan personal. Di sisi lain, HUT PDIP ke 51 pada 10 Januari kemarin tidak dihadiri Presiden Jokowi.

“Dan terbaru pernyataan presiden Jokowi soal bolehnya presiden dan menteri berkampanye serta memihak,” katanya.

Prabowo-Gibran senantiasa mendapatkan serangan isu negatif dari 01 dan 03, sehingga menimbulkan simpati publik. Sementara Prabowo-Gibran malah bersikap sebaliknya, tidak sibuk menyerang sisi negatif lawan, tapi fokus pada kampanye visi, misi, dan program keberlanjutan dengan strategi komunikasi politik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Strategi komunikasi politik penyampaian pesannya pun cukup disukai gen Z dan Milenial yang notabeneanya memiliki 56 persen suara dalam DPT,” katanya.

Prabowo-Gibran fokus

menyosialisasikan visi, misi dan program keberlanjutan Presiden Jokowi. Sebaliknya, 01 dan 03 sibuk menyerang 02 dengan berbagai isu negative, meskipun kadang dengan data yang tidak valid. Misalnya dalam debat soal pertahanan beberapa waktu lalu. Semua isu negatif yang dialamatkan kepada Prabowo-Gibran justru dimanfaatkan sebagai strategi komunikasi politik untuk dikonversi menjadi simpati publik.

“Misalnya isu Samsul (Asam Sulfat) justru dimanfaatkan Gibran untuk membuat turnamen bola mini dengan nama Samsul Cup Soccer, dan seterusnya. Serangan Anies dan Ganjar dalam debat dengan tema pertahanan, justru menimbulkan simpati publik kepada Prabowo,” ujarnya.

Subiran menyampaikan gimmick politik gemoy juga cukup menyerap atensi gen Z dan Milenial. Sehingga

visi, misi dan program bisa disosialisasikan dengan bahasa dan gaya politik gen Z dan Milenial. Selain itu, gaya kampanye Prabowo-Gibran juga sangat mudah dipahami masyarakat, khususnya anak-anak muda.

“Tidak kaku seperti yang dilakukan oleh

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud,” jelasnya.

Lebih lanjut Subiran menyampaikan bahwa program-program populis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat juga sangat mendapatkan atensi positif dari publik. Program susu dan makan siang gratis juga mendapatkan atensi khusus dari masyarakat. Sebab, belum ada yang pernah yang mengkampanye program tersebut.

“Seperti makan siang gratis, susu gratis, keberlanjutan kartu sakti Jokowi mulai dari KIS, KIP, PKH, Kartu Lansia, BLT, hilirisasi, dan lain-lain,” ujarnya.

Subiran mengatakan, kesolidan dan kekuatan mesin partai pendukung koalisi juga sangat mempengaruhi tingginya elektabilitas Prabowo-Gibran. Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat sangat solid hingga di tingkatan kecamatan dan desa dalam menyosialisasikan visi keberlanjutan Prabowo-Gibran.

Disampaikan Subiran, banyaknya kekuatan politik lawan yang perlahan mulai merapat ke Prabowo Gibran. Misalnya pejuang PPP yang diinisiasi oleh beberapa kader PPP yang mendeklarasikan Prabowo-Gibran. Beberapa organ relawan yang tadinya mendukung Ganjar-Mahfud juga berbalik arah mendukung Prabowo-Gibran. Bergabungnya tokoh-tokoh penting PDIP seperti Maruar Sirait dan Budiman Sudjatmiko, akan sangat berpengaruh terhadap kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres.

Selain itu, kata Subiran, yang teranyar berga-

bungnya tokoh seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Mantan KSAD Dudung Abdurrachman, dan masih banyak tokoh berpengaruh lainnya.

Dia menambahkan, kekuatan kampanye sosial media juga cukup kreatif dari tim pemenangan Prabowo-Subianto. Sementara kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud justru banyak memproduksi konten serangan negatif kepada Prabowo-Gibran.

Sementara itu, isu koalisi dan kolaborasi 01 dan 03 justru membuat publik semakin bersimpati kepada Prabowo-Gibran yang mengusung tema keberlanjutan.

“Sebab Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dinilai tidak konsisten dengan wacana dan gagasan yang dikampanyekan. Misalnya Anies-Muhaimin dengan tegas mengusung tema perubahan, aktif menyerang pemerintahan Presiden Jokowi, tapi di sisi yang lain tidak berani menarik menteri dari cabinet, serta ternyata tergoda juga untuk berkoalisi dengan PDIP yang jelas-jelas merupakan ketua kelas partai penguasa,” katanya.

Subiran menambahkan, terkait isu pemakzulan Jokowi yang dihembuskan beberapa kelompok partisan dengan pakaian independen juga justru menciptakan simpati publik kepada Presiden Jokowi dan Prabowo-Gibran.

Sebab, publik menilai ada upaya dari pihak lawan politik Jokowi untuk melengserkan kekuasaan tidak melalui jalur pemilu, tapi melalui kudeta.

“Padahal instrumen pergantian kekuasaan dalam negara demokrasi adalah pemilu yang sudah disepakati bersama, bahkan tahapannya sudah memasuki kampanye dan tinggal 30 hari lagi menuju pemungutan suara di TPS,” katanya.

“Dan yang tidak kalah penting, sosok Gibran yang awalnya banyak pihak underestimate, tetapi ternyata mampu membuktikan kapasitas dan kualitasnya, bukan hanya dipanggung debat, tapi gaya blusukan, komunikasi politik populisnya mengingatkan kembali masyarakat dengan Presiden Jokowi. Sehingga tagline keberlanjutan itu mendapatkan legitimasinya melalui Gibran,” tambahnya.

Subiran menuturkan, Gibran merupakan sosok yang sangat mewaliki kalangan anak muda. Selain itu, Gibran juga sangat memahami dinamika yang dialami oleh anak-anak muda saat ini.

“Gibran benar-benar hadir tidak hanya mewakili kaum muda (milenial dan gen Z) tapi juga cara berpikir, program, komunikasi politik, dan lain-lain sangat khas anak muda, sangat paham dan mengerti kebutuhan anak muda,” pungkasnya. RDO





“Ini dilakukan untuk tujuan memberikan kesan di publik bahwa Ganjar dan Mahfud satu kata, satu pemikiran, dan satu perjuangan”

Efriza



# MAHFUD MULAI BIKIN BLUNDER

**Calon wakil presiden nomor urut 02, Mahfud MD, sudah mengajukan jadwal untuk menghadap Presiden Joko Widodo sehubungan dengan rencananya mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.**

**M**enteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan hal itu dan sudah menerima kedatangan Mahfud di kantornya pada 29 Januari 2024 malam. Kedatangan Mahfud untuk meminta jadwal menghadap Presiden Jokowi dalam waktu dekat.

Meski demikian, Pratikno mengaku belum menerima surat pengunduran diri dari Mahfud. “Belum menyerahkan surat tersebut (pengunduran diri),” kata Pratikno, Selasa, 30 Januari 2024.

Analisis politik Citra Institute, Efriza, menilai rencana mundurnya Mahfud dari kabinet adalah pemaksaan dari PDIP. Hal itu bertujuan untuk memberi kesan kepada publik bahwa pasangan Ganjar-Mahfud taat terhadap aturan, di mana pejabat publik harus cuti jika berkampanye. Aturan tersebut tertuang dalam UU 7/2017 tentang Pemilu.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga menyarankan Mahfud MD untuk mengundurkan diri dari kursi Menko Polhukam. PDIP selaku partai pengusung pun menyambut baik saran Ganjar kepada Mahfud.

“Ini dilakukan untuk tujuan memberikan kesan di publik bahwa Ganjar dan Mahfud satu kata, satu pemikiran, dan satu perjuangan,” katanya.

Kata Efriza, jika dicermati, PDIP khawatir Jawa Tengah semakin kuat digembosi oleh Gibran karena masih menjabat dan bekerja sebagai Wali Kota Solo. Jika narasi mundur hanya ke Gibran semata kelihatan sekali di mata publik bahwa PDIP sedang cemas karena elektabilitasnya di posisi buncit, artinya kemungkinan kalahnya semakin tinggi.

Efriza menyampaikan jika narasi mundurnya hanya untuk Gibran, PDIP pastinya akan melakukan perhitungan terhadap sentimen negatif publik. “Ini memalukan bagi citra PDIP, sebagai partai penguasa, partai peringkat pertama, partai lama, dan partai perjuangan,” ujarnya.

Maka narasi mundur yang terlihat bernilai positif di publik adalah tidak sekadar ke Gibran. Ganjar kemudian menarasikan semua mundur, maka disasanya

Muhaimin Iskandar, Prabowo, Gibran, juga termasuk Mahfud MD, biar fair dan fokus di pilpres seperti dirinya dan Anies.

“Ganjar berharap akan menjadi sentimen positif dari publik kepada PDIP dan Ganjar,” katanya.

Sayangnya, Ganjar lupa sebelum dirinya mengeluarkan opini agar Gibran mundur. Mahfud sebagai cawapres sudah mengeluarkan pernyataan ingin bekerja sebagai Menko Polhukam sampai akhir masa jabatannya.

Alasannya, Mahfud khawatir kerja besar yang diembannya tidak lagi diprioritaskan atau malah diabaikan oleh Menko Polhukam baru. Mahfud juga sebelum dicalonkan sebagai cawapres menyatakan lebih memilih cuti ketimbang opsi mundur.

“Ini menunjukkan bahwa Mahfud MD secara pribadi memang senang dan bangga bekerja sebagai Menko Polhukam sebagai pembantu Presiden Jokowi,” ucapnya.

Kemudian, terbangun narasi baru agar mundurnya Mahfud MD dapat menghadirkan sentimen negatif kepada pemerintah, dan tentu sasarannya kepada Prabowo-Gibran yang tidak memilih mundur sebagai Menhan dan Wali Kota Solo.

Mahfud membangun narasi menyatakan satu pemikiran dengan Ganjar, maupun narasi etis dan moral yang menyudutkan Gibran maupun narasi negatif terhadap pemerintah. Sehingga pernyataan Mahfud ingin mundur diharapkan akan menghadirkan sentimen positif.

“(Sentimen positif) Berupa Mahfud layak disebut pahlawan demokrasi. Mahfud memberikan contoh etika seorang pemimpin, di sisi lain tentu saja sentimen positif untuk elektabilitas pasangan Ganjar-Mahfud,” jelasnya.

Namun, sangat disayangkan, ketika Mahfud mundur, bukan saja sentimen negatif yang didapatkan oleh pasangan ini, tetapi juga sisi emosional Mahfud MD tersorot.

Persepsi positif publik kepada

Mahfud semakin terkoreksi. Sentimen negatif terhadap Mahfud malah tinggi, karena Mahfud dianggap inkonsisten antara pernyataan awal dan pernyataannya yang baru ini.

Mahfud juga dianggap sudah menjadi politisi bukan lagi negarawan. Ketika dia inkonsisten, maka dia ditengarai sudah tidak kokoh dalam pendirian yang terjadi kelabilan, sehingga mudah diatur. Dia juga tidak lagi menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam narasi awal mengabdikan untuk negara, tetapi mulai silau akan kekuasaan.

“Mahfud juga dianggap sisi hasrat berkuasanya terlalu tinggi,” katanya.

Kemudian publik juga membaca narasi mundur Mahfud dipenuhi sikap emosional. Sebab, ketika ia menyampaikan mundur, posisi dirinya di debat cawapres terakhir sedang terekam diingatan publik sebagai

sosok yang sedang tersulut emosinya karena pertanyaan dan perilaku Gibran.

Sehingga, kata Efriza, tampak sekali, sepekan setelah debat cawapres dan ia memilih mundur. Pernyataan-pernyataan Mahfud malah penuh bahasa emosional, seperti tentang “menyimpulkan ibu melahirkan dengan minus anak tak adab dan dosa besar kepada bangsa ini.”

“Tampaknya, jika dicermati, Mahfud memang sudah menjadi negarawan bukan lagi politisi, sehingga ia tampak emosional pasca mundur, ketidakkonsistenan Mahfud ditengarai karena ia harus mengesankan diri satu pemikiran dan satu perjuangan dengan Ganjar untuk menaikkan elektabilitas pasangan ini,” imbuhnya.

Padahal dampak mundurnya Mahfud tidak memberikan sentimen positif besar kepada pasangan Ganjar-Mahfud dari segi elektabilitasnya. Mahfud juga tidak dianggap pahlawan.

“Malah ia mendapatkan persepsi baru bahwa figur dirinya yang sudah menjauh dari sosok profesional dan negarawan. Dia juga sudah mengecewakan masyarakat karena sikap dia yang ingin mengawal kasus-kasus besar dengan tetap bertahan di Menko Polhukam malah dipilih ditinggalkan,” katanya.

Mahfud juga akan dianggap tidak bisa mengontrol emosinya, karena dilecehkan di debat cawapres, dibawa perasaan atau baper, sehingga memilih mundur.

Kesalahan Mahfud terbesar adalah mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Kata Efriza, Mahfud tidak berpikir dengan cermat akan keputusannya, malah yang tergambarkan publik bahwa Mahfud selalu mengkoreksi pendapatnya, tidak konsisten ternyata menjadi lakon dirinya.

“Singkatnya, pilihan Mahfud mundur di kabinet, tidak bisa menjadi harapan besar akan mendongkrak kenaikan elektabilitas pasangan Ganjar-Mahfud, malah turut memberikan setitik noda dari perjalanan karir politik Mahfud sebagai tokoh yang tegas, kokoh pendirian, kaya pengalaman, dan sosok profesional jika tak ingin menggunakan narasi negarawan,” tandasnya. ●RDO







“Anggaran dukungan tahapan pemilu mencakup gaji petugas, sarana dan prasarana, serta operasional perkantoran”

Dwi Puji Handayani

# ANGGARAN PEMILU 2024 MENCAPAI RP71,3 TRILIUN

**Rincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencapai angka Rp71,3 triliun, mengalami kenaikan sekitar tiga kali lipat dari total anggaran Pemilu sebelumnya.**

Dana ini telah diberikan oleh Kemenkeu sejak 20 bulan sebelum Pemilu diselenggarakan pada bulan Februari 2024.

Pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp3,1 triliun, yang kemudian meningkat menjadi Rp30,0 triliun pada tahun 2023.

Pada tahun 2024, alokasi anggaran Pemilu mencapai Rp38,2 triliun, mengalami kenaikan sebesar 57,3% dibandingkan dengan anggaran Pemilu 2019 sebesar Rp45,3 triliun.

Perbedaan jumlah anggaran ini antara lain disebabkan oleh kenaikan honorarium Badan Adhoc, yaitu petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Rencana anggaran ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PMK Nomor 62 Tahun 2023, dan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, dan Bagian Bendahara Umum Negara, Dwi Puji Handayani, menjelaskan bahwa anggaran Pemilu 2024 tidak hanya membiayai teknis penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga berkontribusi pada berbagai program prioritas nasional.

Anggaran tersebut telah diprioritaskan dalam APBN 2024, termasuk untuk mengantisipasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hingga dua putaran, jika terjadi.

“Putaran kedua (jika terjadi) dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024,” jelasnya.

Alokasi dana Pemilu 2024 meliputi berbagai tahapan, seperti perencanaan program dan anggaran, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan dapil, pencalonan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota, masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan dan perhitungan suara, serta penetapan hasil pemilu.

“Anggaran dukungan tahapan pemilu mencakup gaji petugas, sarana dan prasarana, serta operasional perkantoran,” katanya.

Menurut laman kemenkeu, Pemilu di In-

donesia selama ini memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional melalui peningkatan belanja negara dalam APBN yang dialokasikan untuk pelaksanaan Pemilu.

Dampak positif juga dirasakan oleh pendapatan masyarakat dan lembaga non-profit rumah tangga (LNPR) melalui kegiatan kampanye dan pelaksanaan Pemilu.

Pemilu juga dianggap mampu memberikan stimulus tambahan terhadap pendapatan nasional, menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan menjadi investasi integrasi negara dalam jangka panjang.

Diketahui, Pemerintah melalui Kemenkeu telah menyetujui pengajuan anggaran yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menaikkan honorarium penyelenggara pemilu 2024.

Keputusan ini diumumkan melalui Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022, yang membahas Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

Dalam perbandingan dengan pemilu sebelumnya, KPU melaporkan bahwa honorarium bagi badan ad hoc pada pemilu 2024 mengalami peningkatan signifikan.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa pemerintah telah menyetujui kenaikan honorarium bagi badan ad hoc, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Pantarlih, PPLN, KPPSLN, dan Pantarlih LN, dibandingkan dengan Pemilu 2019 dan pemilihan tahun 2020.

Berikut adalah rincian honorarium bagi badan ad hoc penyelenggara pemilu 2024:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):
  - Ketua: Rp 2,5 juta
  - Anggota: Rp 2,2 juta
  - Sekretaris: Rp 1,85 juta
  - Pelaksana: Rp 1,3 juta
2. Panitia Pemungutan Suara (PPS):
  - Ketua: Rp 1,5 juta
  - Anggota: Rp 1,3 juta
  - Sekretaris: Rp 1,15 juta
  - Pelaksana: Rp 1,05 juta
3. Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih):
  - Honor: Rp 1 juta
4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS):
  - Ketua: Rp 1,2 juta (Pemilu 2024); Rp 900.000 (Pilkada 2024)
  - Anggota: Rp 1,1 juta (Pemilu 2024); Rp 850.000 (Pilkada 2024)
  - Satlinmas: Rp 700.000 (Pemilu 2024); Rp 650.000 (Pilkada 2024)

5. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN):

- Ketua: Rp 8,4 juta
- Anggota: Rp 8 juta
- Sekretaris: Rp 7 juta
- Pelaksana: Rp 6,5 juta
- Pantarlih Luar Negeri: Rp 6,5 juta

6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN):

- Ketua: Rp 6,5 juta
- Sekretaris: Rp 6 juta
- Satlinmas Luar Negeri: Rp 4,5 juta

Selain kenaikan honorarium bagi badan ad hoc, pemerintah juga telah menetapkan satuan biaya untuk perlindungan petugas selama proses penyelenggaraan pemilu 2024.

Rinciannya mencakup santunan bagi yang meninggal dunia, cacat permanen, luka berat, luka sedang, dan bantuan biaya pemakaman.

Sebelumnya, Menteri Keuangan

(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan kepada pejabat di Kementerian Keuangan untuk tetap menjaga netralitas pada tahun Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dalam pesannya, Menkeu menekankan pentingnya netralitas selama tahun Pemilu. Ia mengingatkan bahwa netralitas merupakan suatu kewajiban, dan meskipun setiap individu memiliki preferensi pribadi, netralitas tetap harus dijaga sebagai nilai yang menunjukkan ketaatan terhadap hukum dan tata krama.

“Tahun Pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang undang dan diatur oleh tata krama,” tuturnya, dikutip dari keterangan resmi, Jumat 26 Januari 2024.

Menkeu menekankan pentingnya sinergi, kolaborasi, dukungan, dan kepercayaan antar unit di lingkungan kementerian keuangan serta dengan institusi lain.

“Saya yakin akan bisa melewati ujian yang tidak mudah. Jadi tolong manajemen leadership, resources dikelola dengan baik hubungan antar unit ke atas maupun horizontal dengan institusi lain. Itu tugas yang harus Anda lakukan,” tutur Sri Mulyani. •IRY







# SOROTI UNDANG-UNDANG KEBERPIHAKAN PRESIDEN

**Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenai keterlibatan Presiden dan Menteri dalam kampanye politik telah menjadi sorotan utama di kalangan publik. Pernyataan ini menciptakan beragam reaksi dari berbagai lapisan masyarakat, terutama karena berasal dari pemimpin tertinggi Indonesia.**

Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga merupakan Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti aturan yang ada dalam Undang-undang Pemilu sebagai dasar pernyataan tersebut. Meskipun demikian, Puan meninggalkan penilaian atas hal tersebut kepada masyarakat.

“Biar rakyat yang menilai, apakah menjadi Presiden Republik Indonesia ataukah kemudian diperbolehkan untuk memihak,” ujar Puan.

Puan juga menyinggung dugaan keterkaitan pernyataan tersebut dengan dukungan terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Publik mengetahui bahwa Gibran adalah anak sulung dari Jokowi.

Di sisi lain, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pernyataannya sebelumnya mengenai izin presiden untuk berkampanye adalah jawaban atas pertanyaan wartawan dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Dalam keterangan melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jokowi menunjukkan dokumen Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menjelaskan hak presiden dan wakil presiden untuk melaksanakan kampanye.

Jokowi menegaskan kembali bahwa apa yang disampaikan adalah penjelasan mengenai ketentuan Undang-undang Pemilu dan meminta agar pernyataannya tidak disalahartikan atau ditarik ke arah lain. Ia menekankan bahwa apa yang disampaikan adalah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Puan meminta semua pihak menjunjung tinggi etika dalam pelaksanaan perayaan

demokrasi rakyat.

“Kita di sini berdoa bersama memohon keberkahan dan keselamatan menjelang hari pemilu mendatang yang tinggal 23 hari lagi. Pada tanggal 14 Februari 2024, rakyat akan memberikan amanah, menitikkan harapan, dan menyampaikan aspirasinya menuju kehidupan yang lebih baik. Indonesia,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (22/1/2024).

Puan mengimbau masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilu 2024 tetap mengedepankan persatuan dan solidaritas meski berbeda pilihan. Ia berharap pemilu berlangsung damai, baik di tingkat elit maupun akar rumput.

“Saya mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dan melaksanakan pemilu serentak tahun 2024 dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi etika dan hukum, serta selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” jelas Puan.

Ia menambahkan, masyarakat ingin Indonesia tetap sejahtera dan damai meski di tengah pemilihan pemimpin negara. Puan meminta seluruh elemen bangsa tetap bersatu.

“Pemilu hanya sementara, tapi Indonesia tetap harus dikawal,” tegasnya.

Puan juga meminta agar semua pihak menggunakan cara-cara yang bermartabat dalam melakukan advokasi atas pilihannya pada Pemilu 2024.

Ia kemudian menyinggung persoalan maraknya hoaks atau berita bohong, termasuk yang menyasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Tidak hanya itu, Puan Maha-

rani menyoroti intensitas dinamika politik menjelang Pemilu 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari mendatang. Ia menekankan pentingnya para pemimpin dan tokoh masyarakat untuk selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam melaksanakan pesta demokrasi tersebut.

“Pemimpin dan tokoh-tokoh, diharapkan bersikap tenang dan baik agar rakyat melihat Pemilu ini sebagai peristiwa demokrasi yang mempertegas kedaulatan rakyat,” ujar Puan.

Lebih lanjut, Puan menyampaikan harapannya agar para pemimpin dapat memilih pemikiran yang terbaik, sehingga rakyat dapat memilih calon pemimpin dengan bijak.

“Biar rakyat memilih dengan sebaik-baiknya siapa yang akan menjadi pemimpin yang akan datang,” tambahnya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan.

Puan juga menginginkan kontribusi positif dari aparat keamanan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024.

“Saya harapkan seluruh aparat dapat menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Pemilu. Keributan dan permasalahan yang bisa

memicu ketegangan harus dihindari, agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga,” pesannya.

Cucu Bung Karno ini menegaskan pentingnya netralitas aparat dan pemangku kepentingan instansi negara dalam proses Pemilu.

Menurutnya, netralitas ini sangat penting untuk menjaga perdamaian di tengah perbedaan pandangan politik yang muncul selama Pemilu.

“Dekatnya waktu Pemilu membuat situasi semakin tegang, namun saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, aparat penegak hukum, dan tokoh-tokoh untuk bersama-sama mensukseskan Pemilu 2024 dengan damai, tenang, dan tertib,” ucapnya sebagai mantan Menko PMK.

“Semua pihak diharapkan dapat menahan diri dan menyelesaikan Pemilu ini secara damai. Netralitas, kejujuran, dan keadilan harus dijaga. Biarkan rakyat yang menentukan siapa yang akan memimpin ke depan,” ulasnya.

Puan juga menjamin bahwa DPR akan terus beroperasi secara efektif meskipun sedang dalam masa kampanye Pemilu dan Pilpres 2024. Ia menekankan bahwa DPR akan tetap responsif terhadap isu-isu mendesak dan strategis.

“Anggota DPR RI tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas-tugas konstitusional secara efektif, terutama dalam menanggapi hal-hal yang sangat mendesak dan strategis,” katanya.

Puan juga menjelaskan bahwa dalam konteks tugas legislasi, DPR akan melanjutkan pembahasan terhadap 19 RUU yang saat ini masih berada dalam tahap pembahasan tingkat satu.

Rinciannya mencakup tiga RUU usulan DPR, lima RUU usulan pemerintah, tiga RUU usulan DPR, dan tiga RUU kumulatif terbuka.

Selain itu, terdapat 34 RUU yang akan segera masuk dalam daftar pembahasan tingkat satu. Rinciannya melibatkan tiga RUU usulan DPR, dua RUU usulan pemerintah, dan 29 RUU kumulatif terbuka.

Puan menekankan bahwa kompleksitas dalam pembentukan Undang-Undang sangat dipengaruhi oleh sejauh mana perbedaan perspektif dan kepentingan antarpihak yang akan diatur dalam Undang-Undang tersebut.

“DPR RI bersama pemerintah, dalam pembentukan undang-undang, selalu mencari titik temu yang mengutamakan kepentingan negara dan juga memperhatikan aspirasi publik,” tegasnya. ●IRY







“Tidak ingin adanya polarisasi pada Pemilu 2024 yang mengarah kepada perpecahan, diyakini Prabowo Gibran mampu membawa Indonesia terhindar dari perpecahan tersebut”

DD Shineba

INFO  
CALEG

Minggu V • Januari 2024

11

# KONSISTEN PERJUANGKAN ISU REFORMASI

**Penguatan jaringan aktivis persaudaraan '98, saat ini berupaya keras meneruskan agenda reformasi yang menjalankan semua legacy dari pemimpin sebelumnya. Himpunan persaudaraan '98 ini adalah orang-orang yang ingin legacy Presiden Jokowi dilanjutkan.**

Dengan berbagai pertimbangan, persaudaraan '98 ini mendeklarasikan dukungan untuk Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2024 yang dapat melanjutkan legacy Presiden Jokowi.

Legacy politik Presiden Jokowi sangat cocok dilanjutkan oleh orang yang tegas seperti Prabowo Subianto.

Ketua DPD Persaudaraan '98, DD Shineba mengatakan orang-orang pendukung Jokowi dan Prabowo Subianto ini berdiri bersama untuk rekonsiliasi, yang mana agar konflik antar bangsa seperti pada Pemilu 2014 dan 2019 tidak terjadi lagi.

“Tidak ingin adanya polarisasi pada Pemilu 2024 yang mengarah kepada perpecahan, diyakini Prabowo Gibran mampu membawa Indonesia terhindar dari perpecahan tersebut,” ungkapnya, saat menjadi bintang tamu Podcast Info Indonesia, Senin 29 Januari 2024.

Menurut Shineba, agenda reformasi masih terus berjalan, dan perlu diawasi secara terus menerus hingga tercapai bentuk demokrasi saat ini, sesuai dengan aspirasi dan agenda para pejuang reformasi.

“Ini yang harus benar-benar kita kawal, hingga terwujud cita-cita demokrasi yang intinya mensejahterakan rakyat,” tegasnya.

Kombinasi Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka dinilai sangat cocok untuk era saat ini.

“Kombinasi keduanya menurut kami sudah cocok untuk era saat ini. Prabowo memiliki karakter yang kuat, cocok untuk kondisi Indonesia yang sedang melawan perdagangan global yang tidak adil, yang selama ini membuat pemerintah Indonesia kesulitan dan bersusah payah untuk melawan tantangan ekonomi dan politik global,” ujar Shineba.

Selain itu, menurut Shineba, sosok Gibran mewakili kaum muda era kekinian yang memiliki agenda sejalan dengan para pejuang reformasi.

“Karena saat ini dan ke depan, diperlukan generasi muda yang kompetitif dan tangguh,” tambahnya.

Anggota persaudaraan '98 ini sendiri terdiri dari beberapa kelompok profesi yang sudah menyebar di 17 Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan (Sumsel), akan menyumbang 5-6 persen suara untuk pasangan Prabowo-Gibran.

“5-6 persen suara dari total DPT Sumsel sekitar 6,3 juta akan ada dari persaudaraan '98 untuk pasangan Prabowo-Gibran atau sekitar 300-400 ribu suara,” jelasnya.

Tidak hanya mengawal isu reformasi, persaudaraan '98 ini juga akan membantu mengawasi pemberantasan korupsi, terbukanya ruang informasi, penyediaan lapangan pekerjaan hingga penyelesaian kasus tanah yang sering terjadi pada masyarakat, khususnya Sumsel.

Menjawab isu pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon

Wakil Presiden (Cawapres) di Pilpres 2024 yang terkesan dipaksakan oleh Mahkamah Konstitusi, Shineba menjelaskan sosok Gibran tidak dipaksakan untuk menjadi Cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

“Jika melihat keputusan MK mengadili norma bukan mengadili seseorang, artinya siapapun dan kebetulan yang akan maju menjadi Cawapres adalah anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka berusia 35 tahun. Jadi tidak ada kesan dipaksakan,” bebernya.

Bahkan pada lima tahun kedepan, Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Dimana, generasi milenial dan Gen Z akan menguasai DPT sebesar 53 persen.

“Mereka akan menjadi penerus bangsa, jadi anak muda ini harus di dorong sedini mungkin,” tambahnya.

Pentingnya peran anak muda bagi Indonesia, lanjut Shineba akan berpartisipasi dalam menghadapi situasi

ekonomi global, misal perdagangan bebas, perkembangan teknologi yang semakin maju.

“Generasi muda lebih menguasai teknologi, banyak mimpi anak-anak muda membuat aplikasi untuk perkembangan ekonomi, teknologi menimbulkan anak muda untuk entrepreneur,” jelasnya.

Sedangkan untuk isu merasa dizolimi dan merasa dicurangi, Shineba mengembalikan pandangan tersebut kepada masyarakat untuk menilai. Pasalnya Prabowo Subianto adalah sosok penerus Presiden Jokowi yang sangat cocok untuk Indonesia.

Jika dilihat pemilu sebelumnya, potensi kecurangan dan kezoliman lebih tinggi yang mana saat ini Jokowi adalah Presiden yang juga sebagai Capres.

“Dia dianggap bisa menggunakan segala sumber daya yang ada, belum lagi partai pendukung yang bisa digerakkan untuk pemenangan, tapi hal itu tidak dilakukan,” katanya.

Setiap periode harus punya satu kebanggaan dan keberhasilan dalam proses demokrasi, pada 2024 ini bisa dilihat bahwa semua Parpol ada di tiga Paslon.

“Dari sini bisa dilihat kekuasaan terbagi, jadi kalau ada kecurangan dan kezoliman akan ketahuan duluan, belum mulai pasti ketahuan, hari ini penyelenggara dihadapkan Pemilu dengan harus baik, Bawaslu menjalankan perintah dan kewajiban, agar Pemilu sesuai yang diinginkan,” jelasnya.

Sejak pernyataan presiden soal kampanye dan berpihak, Shineba tidak yakin bahwa Presiden Jokowi akan kampanye, basisnya diyakini sudah mencapai 45 persen keatas, diprediksi tidak akan turun.

“Sehingga peluang menang satu putaran sangat terbuka lebar,” sambungnya.

Bahkan dari hasil survei menyebutkan 80 persen pemilih sudah menentukan pilihan, artinya ada 20 persen lagi pemilih masih ragu dan bimbang.

“Yakin 50 persen mendulang suara, jadi untuk apa curang dan Jokowi turun untuk melakukan kampanye. Bahkan, jika turun akan membuat ramai dan bisa mengurangi suara yang sudah dikantongi,” katanya.

Shineba menyebut bahwa pernyataan Jokowi soal kampanye dan boleh memihak hanya untuk cek ombak dan terbukti membuat ramai ramai.

“Pernyataan Jokowi simbol kepanikan, itu ke-liru, bagi kami mau putaran pertama atau kedua kami menang, jadi siapa yang panik?,” sambungnya dengan sedikit tertawa.

●RDR





“InsyaAllah dengan program yang saya miliki dan canangkan dapat menyentuh, khususnya untuk kaum ibu-ibu dan perempuan”

Fitriana



# ANDALKAN WAWASAN BUKAN HANYA PENAMPILAN

**Kesetaraan gender yang sering digaungkan, membuat perempuan di Indonesia berani untuk bersaing dengan para pria untuk terjun di dunia politik. Hal ini terbukti dengan banyaknya perempuan terbaik dan hebat bersaing sebagai calon legislatif dengan berbagai misi yang diembannya.**

**H**ebatnya mereka bukan hanya mengandalkan penampilan tapi juga punya wawasan luas. Hal ini bisa dilihat dari pendidikan, pekerjaan atau usaha yang digeluti selama ini.

Pada edisi ini kami menampilkan dua sosok perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2024 ini.

Salah satu Caleg perempuan yang mengenakan hijab ini mantap mencalonkan diri sebagai Caleg dari Partai Ummat, yang terjun langsung di kancah perpolitikan

Salah satunya adalah Nurhayati SKM, MHKes, MM atau yang biasa disapa Kitty. Wanita berhijab ini

mencalonkan diri sebagai Caleg dari Partai Ummat untuk DPRD Kota Palembang.

Nurhayati akan menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) 5 yang meliputi wilayah Plaju dan Seberang Ulu (SU) II dengan nomor urut (1).

Dengan latar pendidikan kesehatan yang dimilikinya Nurhayati dikenal perhatian dengan masalah lingkungan. Untuk itulah dia mencoba terjun ke dunia politik untuk memperjuangkan dan berbuat untuk masyarakat banyak.

Nurhayati menjelaskan, hadirnya Caleg perempuan yang identik dengan kaum Emak-emak, biasanya lebih menyentuh hati masyarakat banyak, dibandingkan dengan kaum pria. Hadirnya mereka juga menambah kesan dan pesan yang positif untuk sebagian masyarakat khususnya dari kalangan perempuan.

Perempuan yang dikenal sebagai penggiat kesehatan di Kota Palembang ini, dalam pergerakannya fokus untuk memperjuangkan di dunia kesehatan.

Dia merasa miris melihat kurangnya kesadaran

masyarakat terhadap kesehatan baik secara pribadi maupun lingkungan

“Kita sama-sama bisa melihat di wilayah khususnya di Dapil saya sendiri, di wilayah Plaju masih banyak daerah yang terlihat kumuh khususnya daerah sepanjang bantaran sungai, di bawah rumah masyarakat, banyak sampah yang berserakan. Jika ini dibiarkan maka ini akan menjadi bibit penyakit dan mengganggu kesehatan,” terangnya.

Dari situlah dia hadir untuk memberikan solusi dan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya hidup sehat karena jika tubuh sehat akan terbentuk.

Kemudian masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan fasilitas kesehatan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian dari pemerintah.

“Sehingga terkadang masyarakat takut untuk berobat dan melakukan pengecekan kesehatan karena dibayangi jika masuk RS harus memiliki biaya yang cukup besar dan dari situ akhirnya masyarakat Abai akan kesehatan dirinya,” tegas perempuan yang sempat mengajar di perguruan tinggi ini.

Nurhayati yakin dirinya akan terpilih menjadi Caleg untuk mewakili Plaju dan daerah SU II, berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat.

Menurutnya wakil rakyat dipilih tujuannya untuk mendengarkan keluhan masyarakat serta bisa merealisasikan apa yang menjadi harapan masyarakat. Untuk dia berpesan kepada masyarakat, jangan pernah bermimpi mempunyai pemimpin yang jujur dan amanah jika hak suara saja masih bisa dibeli.

Nurhayati juga mengajak masyarakat kota Palembang khususnya daerah Dapil 5 yang meliputi wilayah Plaju dan SU II untuk datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

“Ingat jangan lupa buka kertas suara warna hijau coblos atas nama Nurhayati SKM MHKes MM, nomor urut satu (1) dari Partai Ummat karena pilihan anda menentukan masa depan Bangsa,” tegas perempuan asal Plaju ini.

Komitmen yang sama disampaikan Fitriana SH atau biasa disapa Pingky yang merupakan Caleg DPRD Provinsi Sumsel dari Partai PBB dari Dapil Sumsel Satu (1).

Wanita enerjik ini rencana akan menjadi wakil rakyat di wilayah Kecamatan Bukit Kecil, Ilir Barat 1, Ilir Barat 2, Gandus, Kertapati, Seberang Ulu 1, Jakabaring, Seberang Ulu 2 dan Plaju.

Kini dia semakin mantap dan matang untuk bersaing pada Pemilu 2024 yang tidak lama lagi akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Fitriana mengungkapkan, dia merasa yakin bahwa pada 14 Februari mendatang akan terpilih dan mampu merebut hati dan simpati masyarakat Palembang, bahkan saat ini Fitriana terus bergerak melakukan kampanye dan turun kelapangan.

“Saat ini saya terus bergerak turun ke lapangan dan terus berjuang untuk merebut hati masyarakat dan saya berkeyakinan saya akan terpilih dan dapat duduk di kursi DPRD Sumsel,” ungkap perempuan pebisnis handal ini.

Pingky berkeyakinan menang pada Pemilu 2024 karena para kaum perempuan di Sumsel, tentunya mengharapkan perubahan dan pasti wakil yang akan memilih perempuan karena dapat merealisasikan dan mampu memperjuangkan hak-hak wanita tentunya.

“InsyaAllah dengan program yang saya miliki dan canangkan dapat menyentuh, khususnya untuk kaum ibu-ibu dan perempuan. Akan saya realisasi program andalan yang mampu membuat dan menciptakan perempuan hebat dengan memfokuskan di bidang UMKM serta memberdayakan perempuan agar dapat berdiri dikaki sendiri tanpa menjadi beban,” terangnya.

Untuk merealisasikan niatnya tersebut Fitriana didukung tim yang solid dan militan dalam mensosialisasikan semua program yang ditawarkannya. Sehingga dengan dibarengi niat baiknya, hal itu bisa terwujud.

“Tanpa mendahului, 99 persen saya yakin menang karena kita kerja keras dan turun ke masyarakat untuk sosialisasi. Satu persen lagi saya serahkan kepada Allah tentunya. Untuk itu jangan lupa pada tanggal 14 Februari mendatang untuk melakukan pemilihan. Jangan lupa coblos Fitriana Caleg DPRD Sumsel Nomor urut satu (1) dari Partai PBB,” ajak perempuan modis ini. ●RDR







“Jika Demokrat bekerja optimal, paslon 02 Prabowo-Gibran akan mendapatkan insentif elektoral di basis-basis kekuatan Demokrat selama ini”

Ahmad Khoirul Umam

# DEMOKRAT BARU DIAKUI JOKOWI

**Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Yogyakarta, Minggu, 28 Januari 2024. AHY menjadi ketum terakhir yang ditemui Jokowi setelah bertemu Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan.**

**M**enurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, pertemuan Jokowi dan AHY membahas berbagai persoalan kebangsaan hingga situasi politik di Tanah Air saat ini.

Ari menyampaikan, pertemuan Jokowi dengan para tokoh politik tersebut merupakan hal yang biasa. Apalagi, pertemuan itu diselenggarakan saat hari libur dan dalam suasana informal.

Ari mengatakan, menjalin komunikasi dan silaturahmi antartokoh politik dan antartokoh bangsa sangat penting dilakukan. Selain itu, ia menilai, pertemuan tersebut perlu didukung demi kebaikan dan kemajuan bangsa. Pasalnya, berbagai persoalan kebangsaan tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Menurut Ari, diperlukan kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai tokoh lainnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief, yang menyebut pertemuan Jokowi dan AHY hanya melakukani diskusi biasa. Andi membantah keduanya membahas soal strategi pemenangan pasangan calon 02 dalam pertemuan itu.

Selain itu, Andi juga menyebut, keduanya tidak membahas mengenai kabinet. Menurut dia, baik AHY maupun Jokowi saling memahami posisi Demokrat saat ini yang berada di luar pemerintahan. Sedangkan dukungan Demokrat terhadap pasangan calon Prabowo-Gibran merupakan hal yang berbeda.

AHY sendiri mengakui pertemuannya dengan Jokowi membahas mengenai isu kebangsaan dan juga persiapan pemilu agar berjalan aman, damai, dan demokratis.

“Usai bersepeda dan sarapan bersama Bapak Jokowi, kami banyak berdiskusi membahas isu-isu kebangsaan dan tentu terkait kesiapan Pemilu agar berjalan dengan aman, damai dan demokratis,” ujar AHY.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, menilai, pertemuan Presiden Jokowi dan AHY adalah

untuk memastikan mesin politik kemenangan pasangan Prabowo-Gibran berjalan optimal.

“Jokowi tampaknya ingin memastikan infrastruktur kemenangan dan mesin politik Prabowo-Gibran benar-benar berjalan optimal, jelang 16 hari menuju Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang,” kata Umam, Minggu, 28 Januari 2024.

Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina tersebut menuturkan, pertemuan Jokowi dan AHY merupakan bentuk pengakuan terhadap peran Partai Demokrat dalam proses kemenangan Prabowo-Gibran. Secara tersirat, Jokowi memang mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

“Saat itu, sejumlah spekulasi bermunculan, mengapa Jokowi tidak menemui Ketum Partai Demokrat. Maka, pertemuan Jokowi dan AHY hari ini menyempurnakan rangkaian pertemuan itu,” ujar Umam.

Menurut Umam, pertemuan tersebut sekaligus menegaskan arah keberpihakan dan dukungan politik Jokowi untuk Prabowo-Gibran.

“Ketegasan AHY dan Demokrat untuk mendukung Prabowo-Gibran ini wajar dan

cukup bisa dipahami, mengingat menang atau kalahnya Prabowo-Gibran di Pemilu 2024 ini akan menjadi ‘pertaruhan besar’ bagi Demokrat, yang selama 10 tahun ini telah memilih berpuasa dari kekuasaan,” lanjutnya.

Umam menyebut Demokrat memiliki peran cukup penting terhadap elektoral Prabowo-Gibran di sejumlah wilayah. Menurut dia, kans Prabowo-Gibran akan kian besar memenangkan pilpres satu putaran.

“Jika Demokrat bekerja optimal, paslon 02 Prabowo-Gibran akan mendapatkan insentif elektoral di basis-basis kekuatan Demokrat selama ini, terutama di wilayah Jawa Timur area Matraman atau Selatan, lalu Jawa Barat, Banten, Aceh, Sumatera Barat, dan sejumlah titik di Sumatera secara umum, termasuk juga beberapa simpul kekuatan di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua,” katanya.

Begitu pula dengan Demokrat, kata dia, akan mendapat benefit politik dari suara Prabowo-Gibran. Menurutnya, masih banyak pemilih yang cenderung terbawa mendukung paslon tertentu yang relatif tercitrakan dekat dengan kekuasaan.

“Sebab, selain memiliki magnet politik sendiri sejak Pemilu 2004, Demokrat juga bisa mem-

oleh efek ekor jas atau coat-tail effect. Sebab, karakter swing voters dan DNA pemilih di Indonesia umumnya cenderung digerakkan oleh tren umum dan dinamika isu jelang Pilpres, di mana para pemilih cenderung terbawa ikut-ikutan mendukung paslon tertentu yang memiliki kemungkinan menang lebih besar dalam pilpres, serta paslon yang relatif tercitrakan lebih kuat serta dekat dengan kekuasaan atau the ruling power,” kata Umam.

Dinamika politik semacam ini, Umam mengungkapkan, seringkali terjadi dan menggeliat di akar rumput, sebagai fenomena politik alamiah yang secara sosio-antropologis, terbukti terjadi di Pilpres 2009, 2014, dan juga 2019. Karena itu, narasi Demokrat yang belakangan digemakan AHY tentang pentingnya keberlanjutan dan perbaikan, sebagai derivasi nama lain dari perubahan, cukup relevan dan bisa ia kapitalisasi untuk penambahan kekuatan suara di Pemilu 2024.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad, juga menyebut Presiden Jokowi memberikan tekanan kepada AHY agar bergerak memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 satu putaran.

“Saya kira dukungan pada partai-partai itu nggak linier dengan dukungan pada pasangan capres-cawapres, dan sekali lagi kita juga ditunjukkan di beberapa data misalnya untuk swing voters untuk konteks Pilpres itu masih mungkin sekitar 15 persen ya, untuk undecided voters pun juga bisa sekitar mungkin 6-8 persen,” ucap Nyarwi, Senin, 29 Januari 2024.

“Artinya apa, kinerja partai ini yang saya kira Pak Jokowi itu berusaha untuk menge-push walaupun kemudian orang bertanya, ini sebenarnya yang nyapres itu siapa,” sambungnya.

Nyarwi menambahkan, dalam studi perilaku pemilih memang ada yang namanya split ticket voting dan itu wajar terjadi. Maka itu, pertemuan yang dilakukan Presiden Jokowi ditujukan agar parpol pendukung memperkuat dukungannya jelang 14 Februari 2024.

“Ada misalnya dalam studi perilaku pemilih itu ada namanya split ticket voting, jadi biasa itu, para pemilih memilih partai tetapi tidak sepenuhnya gitu ya akan memilih pasangan capres-cawapres 100 persen, jarang yang ada sampai 100 persen, mungkin sampai 80 untuk partai-partai yang bagus, tapi ada juga yang rata-rata 60 bahkan 50 di beberapa data survei itu terpotret,” kata Nyarwi.

●RDO





“Meskipun Presiden Jokowi tidak ikut berkampanye, seluruh rakyat Indonesia sudah mengetahui dengan benar siapa paslon yang didukung”

*Viva Yoga Mauladi*



# PAN MAKIN JOKOWI BANGET

**Partai Amanat Nasional (PAN) makin menunjukkan kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.**

kami dapat sambutan yang hangat, Pak Prabowo-Gibran sambutannya luar biasa, hangat sekali,” ujar Zulhas.

Menurut Zulhas, dengan kerja waktu yang ada hingga hari pemilihan, dirinya yakin Prabowo-Gibran bisa menang satu putaran.

“Menurut saya, di sisa waktu, kalau kerja keras, (dengan) menyapa rakyat, menyampaikan pikiran-pikiran kita, menyampaikan apa yang (telah) kita lakukan, melanjutkan apa yang dikerjakan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kan sangat pembaharu yah, membangun UMKM, tol Jawa tembus, tol Sumatera tembus, kalau saudara pergi ke Labuan Bajo, hote bintang 5 banyak, jadi maju sekali,” ujar Zulhas.

“Ini ingin kita lanjutkan, termasuk urusan-urusan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, seperti PKH, bansos, BLT el nino itu akan dilanjutkan, termasuk dana abadi pondok. (Jika itu dilakukan) Insya Allah (Prabowo-Gibran) sekali putaran bisa,” kata Zulhas.

Zulhas yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama Partai Golkar, Gerindra, dan Demokrat yang mengusung Prabowo-Gibran juga makin semangat mengampanyekan pasangan calon presiden nomor urut 01 dalam beragam kesempatan. Salah satunya saat Kirab Kebangsaan Prabowo-Gibran di Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, 28 Januari 2024.

Dia mendukung kemenangan Prabowo-Gibran demi melanjutkan program pemerintahan Presiden Jokowi. “Kenapa kita mesti menang sekali putaran? Karena kita ingin melanjutkan program-program hebat dari pemerintahan Pak Jokowi,” ungkap Zulhas.

Zulhas pun terus merinci sejumlah capaian pemerintahan Jokowi, baik di bidang infrastruktur, sosial, ekonomi, hingga kesehatan. Beberapa contoh di antaranya ialah pembangunan jalan tol Trans-Jawa yang kini telah membentang hingga Surabaya, Jawa Timur. Selain itu, dia pun menyinggung soal pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang dibangun di masa pemerintahan Jokowi.

“Kita punya kebanggaan Ibu Kota Nusantara zaman pemerintahan Pak Jokowi. Pelabuhan dibangun, bandara dibangun, ekonomi dibangun,” kata Zulhas.

Zulhas menambahkan jika terpilih menjadi pemimpin Indonesia nantinya, Prabowo-Gibran akan mendukung anak-anak di Indonesia tetap sehat dengan meningkatkan gizi anak.

“Pak Prabowo-Gibran akan membantu agar anak-anak kita sehat, disediakan makan siang gratis. Ditambah minum susu. Pak Prabowo seumur hidupnya sudah menyediakan jiwa raganya untuk merah putih. Seluruh hidupnya digunakan, dikorbankan untuk NKRI,” tutur Zulhas.

Menteri Perdagangan ini juga merespons pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan presiden hingga menteri boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi Pemilu. Menurut Zulhas, memihak dan berkampanye merupakan hak bagi presiden yang merupakan publik sekaligus pejabat politik.

“Itu hak. (Contohnya) saya kan menteri, boleh nyapres, boleh mendukung, boleh maju gubernur. Cak Imin DPR boleh maju Wapres, boleh kampanye. Jadi itu pejabat politik pejabat publik boleh mendukung. Itu haknya untuk maju capres, maju gubernur, maju DPR silakan. Mendukung juga silakan,” kata Zulhas.

Zulhas sendiri sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Sebab menurutnya, pernyataan Presiden Jokowi terkait presiden hingga menteri boleh memihak dalam kontestasi Pemilu telah memberi pengetahuan bagi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, juga mengaku setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa seorang presiden boleh berkampanye dan memihak dalam kontestasi pemilu. Viva meminta masyarakat tidak perlu cemas jika presiden memihak pasangan calon tertentu.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, cemas, was-was terhadap sikap Presiden Jokowi. Pak Jokowi akan tetap menjaga iklim demokrasi menjadi lebih berkualitas, pemilu dapat berjalan aman, nyaman, damai, dan menggembirakan,” kata Viva Yoga.

Menurutnya, tidak ada yang salah presiden dan menteri berpihak dan berkampanye. Dia menuturkan jika presiden ikut berkampanye, maka sudah jelas siapa calon yang didukungnya.

“Meskipun Presiden Jokowi tidak ikut berkampanye, seluruh rakyat Indonesia sudah mengetahui dengan benar siapa paslon yang didukung,” sambung dia.

Viva Yoga mengatakan presiden boleh ikut kampanye diatur dalam undang-undang. Namun, tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jika presiden ikut berkampanye, maka hal tersebut telah diatur di Undang-undang Pemilu, dengan berpedoman pada pasal 281 UU Pemilu bahwa harus cuti di luar tanggungan negara, dan dalam melaksanakan kampanye, dilarang menggunakan fasilitas negara, sebagaimana diamanatkan di Pasal 304 ayat (1) UU Pemilu,” tuturnya. ● RDO

Pada awal tahun ini, 7 Januari 2024, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, makan siang bersama Presiden Jokowi di Medja Restaurant, Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat. Pertemuan Jokowi dan Zulhas ini berlangsung setelah Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto.

Saat bertemu Jokowi, Zulhas juga turut didampingi kader PAN yang tergabung dalam blue squad, antara lain Zita Anjani, Eko Patrio, Sigit Purnomo atau Pasha Ungu, Adelia Pasha, Uya Kuya, Astrid Uya Kuya, Bima Arya, dan Viona Rosalina.

Usai makan siang, Zulhas menjelaskan apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut di antaranya terkait sambutan pasangan Prabowo-Gibran saat dirinya kampanye keliling Indonesia.

“Saya kan koalisi, lapor ya kan. Saya (sudah keliling) ke Indonesia Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya bilang, Pak





“Mau jadi kepala daerah tapi tidak tahu apa yang akan dibuat, malu. Atau sudah tidak berhasil masih mau nyalon, kalau tidak berhasil ya sudah jangan maju lagi”

**Eddy Santana Putra**

# BOLEH PINTAR JANGAN MENGAKU PINTAR

**Eddy Santana Putra secara tegas menyatakan akan maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024, meski ada nama mantan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya yang digadang-gadang bakal maju sebagai Cagub Sumsel.**

**B**ahkan, baru-baru ini Mantan Wali Kota Palembang dua periode ini menyebutkan siap bersaing dengan Mawardi Yahya.

“Tidak masalah, bersaing kita, siapa yang terbaik,”ungkapnya, saat menjadi bintang tamu podcast Info Indonesia, belum lama ini.

Eddy Santana Putra atau dikenal dengan nama ESP berjanji akan membawa Sumsel menjadi lebih baik dari sebelumnya pada masa jabatan Herman Deru, yang dinilai tidak ada perubahan dan hanya begitu-begitu saja.

“Mawardi kan sudah ada pengalaman mendampingi Herman Deru sebagai Wakil Gubernur Sumsel, tapi apa hasilnya biasa saja,” tegasnya.

ESP, Anggota DPR dari Partai Gerindra, optimis dengan hasil survey di Dapil-nya yang menunjukkan Gerindra meraih 2 kursi, menjadi nomor 1.

“Insya Allah tetap ya, kalau di kursi pertama dengan 24,7%, kedua 17%, ketiga 13%, dan jika suara Gerindra saya hitung-hitung mencapai 500 ribu ke atas, mudah-mudahan itu juga mencerminkan dukungan bagi saya. Jadi, Insya Allah kita bisa menjadi semakin hebat,” tandasnya.

Tentang keinginannya mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumsel, alasan utamanya adalah untuk membereskan Sumsel dari segi pembangunan.

“Harus ada pembangunan. Ini urusan Kota Palembang, tapi jika saya jadi Gubernur, saya juga bisa memengaruhi sebagai wali kota dengan otoritas kewenangan dan anggaran. Saya akan ajak Wali kota untuk membahas mengapa Palembang gelap dan semakin kotor,” ujarnya.

Ia menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi Palembang yang mandek setelah dirinya meninggalkan kota pempek ini.

Ia berharap dapat mendapatkan dukungan untuk menjadi gubernur agar dapat menangani masalah kota maupun kabupaten, termasuk masalah lingkungan.

ESP juga membahas masalah bandara internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, yang sebelumnya melayani rute Palembang-Singapura dan Palembang-Malaysia

sebelum pandemi COVID-19.

Ia mencatat bahwa semua penerbangan berkurang selama pandemi dan beberapa rute penerbangan hilang. ESP menyebutkan akan menyampaikan permasalahan ini kepada Menteri Perhubungan pada pertemuan selanjutnya.

Mengenai program kedepan bagi pengusaha, ESP berbagi pengalaman tentang pembuatan acara untuk pengusaha. Ia menekankan pentingnya memperkenalkan kewirausahaan kepada anak-anak sejak dini, karena tidak semua orang dapat menjadi pegawai negeri atau bekerja pada sektor formal.

Menurutnya, menjadi pengusaha adalah salah satu cara untuk meraih kesuksesan ekonomi.

Jika terpilih menjadi Gubernur Sumsel, Eddy akan merubah suasana Sumsel menjadi lebih baik.

Terutama pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang harus bisa direalisasikan, termasuk jalan dari Palembang menuju Pelabuhan Tanjung Carat harus bagus.

“Paling utama nanti Pelabuhan Tanjung Carat itu harus terbangun, termasuk jalan menuju Tanjung Carat harus bagus,” katanya.

Tidak hanya jalan yang harus bagus, Eddy juga menyebutkan akan dibangunnya jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat.

Ditegaskan Eddy jalan tol Lampung-Bakauheni ke Palembang, Palembang Jambi, Palembang Bengkulu harus selsai.

“Semua jalan tol ini harus selsai, lalu bagaimana caranya? Kan saya anggota DPR RI Komisi V, gampang bisa kita cari solusi,” jelas Eddy.

Dia juga mengadakan tempat rekreasi bagi warga Palembang yang sudah lama menghilang. Misal akan dibuatnya pelataran mulai dari Jembatan Ampera terhubung ke Jembatan Musi VI, Seberang Ulu dan Seberang Ilir terhubung ke Jembatan Musi IV.

“Bisa jadi tempat rekreasi, bersepeda, jalan kaki, senam dan lainnya,” sambung dia.

Tidak adanya tempat rekreasi, bisa dilihat saat ini anak-anak dan keluarga lebih memilih ke Mall karena tidak ada kebun

binatang, tidak dunia fantasi.

“Jadi seorang gubernur harusnya bisa membangun itu,”sambungny.

Tidak hanya itu, seluruh Kabupaten/Kota harus bisa menikmati air bersih, tidak hanya di Ibu Kota Kabupaten, dengan cara kerjasama antara Pemerintahan Provinsi dan perusahaan air bersih.

Jalan tol Lahat Pagaralam harus dipercepat, jika sebelumnya Lahat ke Pagaralam memakan waktu 1,5 jam akan dipersingkat menjadi 40 menit.

Diakui Eddy, menjadi kepala daerah sebaiknya jangan terlalu asyik hingga lupa diri dengan masa jabatan lima tahun. Hingga pada akhir masa jabatan baru menyadari tidak ada pembangunan saat menjabat sebagai kepala daerah

“Jika terlalu asyik hingga tidak menyadari bahwa jelang akhir masa jabatan tidak ada pembangunan yang dilakukan sehingga zonk,”ulasnya.

Menjadi kepala daerah boleh pintar tapi jangan mengaku pintar, tidak akan bisa menguasai masalah sehingga membutuhkan kerjasama dengan in-

stansi terkait lain.

Karena terlalu asyik dengan jabatan sehingga terjebak dalam kasus korupsi, perlu diingat bahwa jabatan ini adalah amanah yang diberikan oleh rakyat. Artinya harus diingat fungsi dan tugas pokok untuk mensejahterakan rakyat.

“Saya akan menempatkan orang-orang yang bertanggung jawab,”sambungny.

Jika ingin menyelesaikan masalah di Sumsel harus dimulai dari masalah yang besar sehingga masalah kecil akan mudah diselesaikan

“Mau jadi kepala daerah tapi tidak tahu apa yang akan dibuat, malu. Atau sudah tidak berhasil masih mau nyalon, kalau tidak berhasil ya sudah jangan maju lagi,” tegasnya dengan lantang.

•IRY







# TIGA KALI GAGAL BENNY K HARMAN MAJU LAGI

**Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mendorong Benny Kabur Harman, Wakil Ketua Umum (Waketum), untuk kembali mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2024.**

**B**enny tetap dicalonkan, meskipun sebelumnya telah mengalami tiga kegagalan dalam Pilgub NTT.

Juru Bicara Demokrat NTT, Frids Wawo Lado, mengonfirmasi bahwa terdapat perintah resmi dari DPP Demokrat kepada Benny, yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI.

“Demokrat NTT siap melaksanakan perintah dari DPP. Setiap kader Demokrat di Provinsi NTT diharapkan untuk menyosialisasikan sosok Benny K Harman dan mendukungnya secara terbuka. Seluruh kader Demokrat diwajibkan untuk mematuhi perintah dari DPP,” ungkap Frids.

Frids menyatakan bahwa Benny telah diberikan mandat oleh Partai Demokrat melalui surat tugas nomor 39/INT/DPP. PD/XII/2023, yang dikeluarkan pada 19 Desember 2023 dan ditandatangani oleh Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya.

“Walaupun kami di DPD NTT telah menerima surat mandat dari pusat, namun bukti fisik surat tersebut belum diterima. Surat tersebut memberikan mandat kepada Benny K Harman untuk berkomunikasi dengan partai lain guna memenuhi syarat minimal 20 persen dukungan koalisi. Benny juga diminta untuk mencari dan mengusulkan pasangan calon wakil gubernur (cawagub),” jelas Frids.

Frids menegaskan bahwa sesuai dengan mandat tersebut, Partai Demokrat NTT akan berupaya mendekati partai lain untuk mendapatkan dukungan bersama agar Benny dapat maju dalam Pilgub 2024.

Dia menambahkan bahwa DPP melihat Benny K Harman sebagai sosok berpengalaman dalam politik dan memiliki kemampuan untuk memimpin NTT lima tahun ke depan.

Lebih lanjut, Frids menjelaskan bahwa DPP Demokrat belum menentukan calon pendamping untuk Benny sebagai bakal cawagub. Keputusan mengenai pasangan cawagub diberikan kepada Benny sendiri, dengan kriteria yang mencakup aspek politis, populis, dan kemampuan pelayanan masyarakat yang sesuai untuk lima tahun mendatang.

Benny K. Harman sebelumnya pernah

mencalonkan diri dalam tiga Pilgub NTT. Ia pertama kali mencoba pada Pilgub NTT 2008 bersama dengan Alfred Kase, kemudian pada Pilgub 2013 berpasangan dengan Willem Nope.

Pada Pilgub NTT 2018, Benny K. Harman kembali mencalonkan diri bersama dengan Benny Litelnony, namun sekali lagi mengalami kegagalan.

Selain tugas tersebut, Partai Demokrat juga memberikan tanggung jawab kepada Benny untuk mencari dan mengusulkan nama calon wakil gubernur yang akan mendampingi.

Benny juga diminta untuk melaporkan hasil survei elektabilitas terbaru serta perkembangan kerja sama dengan partai politik yang mendukungnya sebagai calon gubernur.

Teuku Riefky Harsya menekankan pentingnya Benny Harman melaporkan hasil survei terbaru dan kerja sama dengan partai politik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh DPP Partai Demokrat.

Sepak terjang politisi senior Partai Demokrat, Benny Kabur Harman atau Benny Harman di panggung politik tanah air tak diragukan.

Pria yang lahir di Manggarai Flores pada 19 September 1962 saat ini tercatat sebagai anggota Komisi III yang membidangi politik dan pemerintahan di dalam negeri yang termasuk didalamnya urusan-urusan politik dan Pemilu.

Benny yang dikenal BKH telah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) empat periode sejak 2004. Pada periode pertamanya, Benny terpilih melalui kendaraan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia).

Selanjutnya, ia menjadi bagian Partai Demokrat sejak 2008 hingga saat ini. Pada 2009-2012, ia menjabat Ketua Komisi III yang membidangi penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan

Hak Asasi Manusia DPR RI

Kurun 2012-2014, Benny dipercaya sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI.

Selanjutnya pada periode 2014-2019, Benny menjadi Wakil Ketua Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan saat zaman kejayaan Partai Demokrat.

Ia juga menjadi Ketua Departemen Penegakan Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

Selain itu, ia juga menjadi Wakil Presiden South-East Asian Parliamentarian

Forum Against Corruption (2005-2010), bagian dari organisasi parlemen dunia untuk antikorupsi.

Benny Harman tercatat pernah mengikuti Pilgub NTT sebanyak dua kali yaitu pada edisi 2013 dan 2018.

Sebelumnya pada Pilgub 2008, Benny Harman yang berpasangan dengan Alfred M Kase (Harkat) tidak memenuhi syarat dukungan 15 persen total suara DPRD NTT. Paket Harkat diusung oleh PPD, Demokrat, PPP, PPDK, dan PKB yang tergabung dalam Koalisi NTT Bangkit.

Adapun Pilgub 2008 dimenangkan paket Frans Lebu Raya-Esthon Foenay yang diusung PDI Perjuangan.

Pada edisi Pilgub 2013, Benny Harman kembali maju dan berpasangan dengan Willem Nope. Dalam Pilgub yang diikuti empat paket itu, pasangan Benny Harman - Willem Nope mendapat 242.610 suara atau 10,61 persen atau menempati peringkat empat.

Pasangan Frans Lebu Raya dan Benni Alexander Lytelnoni menjadi pemenang setelah Pilgub dilaksanakan dua putaran.

Selanjutnya pada edisi Pilgub NTT 2018 Benny Harman berpasangan Benny Litelnony yang merupakan Wakil gubernur NTT incumben juga kalah dan menempati posisi buntut dari empat paket yang bertarung.

Pasangan Benny - Benny meraup 443.796 suara atau 18,63 persen dari total suara. Pada edisi Pilgub 2028, pasangan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef Nae Soi menjadi pemenang dengan perolehan 838.213 suara atau setara 35,20 persen. ● IRY







“Nilai demokrasi itu seharusnya semakin hari semakin ditingkatkan”

Ahmad Samudra

INFO  
DAPIL

Minggu V • Januari 2024

17

# KECURANGAN PEMILU PASTI ADA

**Menjelang Pilpres 2024 suhu politik di Indonesia semakin meningkat. Aksi saling melapor dan mengadu dilakukan para kontestan. Sehingga masing-masing pihak juga saling merasa kalau mereka merasa dicurangi bahkan dizalimi.**

Aksi kecurangan dan penzaliman tentu dimaknai dengan banyak tafsir mulai dari intimidasi, ketidaknetralan aparat serta keberpihakan penyelenggara Pemilu kepada salah satu Paslon. Termasuk rencana kampanye Presiden Joko Widodo yang dianggap sebagai bentuk dukungan pada salah satu calon.

Dari pengamatan kader, relawan, dan tim pemenangan meski suasana politik di Pemilu 2024 ini tidak separas periode lalu namun kecurangan-kecurangan itu masih terus berlangsung hingga saat ini.

Sekretaris Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar Pranowo - Mahfud MD Sumsel Agus Sutikno menyebutkan ketidaknetralan itu terjadi karena keterlibatan penguasa. Hal itu harus diawasi oleh rakyat Indonesia agar netralitas Pilpres 2024 tidak merosot dari penyelenggaraan sebelumnya.

“Ini demi anak cucu kita nantinya. Banyak sekali dilaporkan dan beragam ketidakadilan, mulai dari penurunan balihoo dan sebagainya,” kata Agus Sutikno yang juga menjadi Caleg DPR RI dari PPP Dapil Sumsel 1 ini.

Menurut Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumsel ini, dia juga merasa kecewa komentar orang nomor satu di Indonesia Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan mendukung salah satu paslon.

Dari sana tanpa diberikan penjelasan Jokowi dipastikan, Jokowi pasti mendukung anaknya Gibran Rakabuming Raka ikut berkompetisi mencalonkan diri sebagai Cawapres nomor urut 2 bersama Capres Prabowo Subianto.

“Siapa pun tahu Jokowi pastinya akan mendukung anaknya ikut turun ke jalan kampanye itu sikap ketidaknetralan Kepala Negara. Apalagi terlihat oleh rakyat ikut membagikan beras. Walaupun rakyat tidak memiliki ilmu politik tetap mereka tahu tujuannya itu apa,” jelasnya dalam diskusi podcast Info Indonesia dengan tema merasa dizalimi, merasa dicurangi.

Dia menilai hiruk pikuk polemik Pilpres 2024 ketidaknetralan adanya peran dukungan dari pemerintah dan penyelenggara akan menjadi trek record buruk bagi sejarah bangsa dan negara. Kondisi itu tidak bisa menjadi contoh demokrasi yang baik bagi generasi muda terlebih lagi di

Pilpres 2024 melibatkan pemilih pemula Gen Z dan kaum milenial.

“Bisa menegakkan keadilan itu sekarang yang bisa kita percaya hanya rakyat. Namun kondisi ini akan sangat buruk untuk generasi penerus kita nantinya kaum Gen Z dan anak-anak cucu kita nantinya. Kalau kedepannya sampai pemilihan terus terjadi seperti ini,” ucapnya lagi.

Dia juga mencermati tim pemenang paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran tetap optimis menang satu putaran dinilai tidak rasional atau tak relevan. Dimana kalau belum 50 persen ke atas tidak akan relevan bisa menang satu putaran. Lalu dia memberikan saran untuk paslon nomor urut 2 jangan terlalu per-

ada kemungkinan satu putaran. Jadi jangan percaya kepada survei sebab bukan sesuatu hal yang bisa menentukan hasil akhirnya,” pungkasnya.

## Tak Yakin Jokowi Ikut Kampanye

Meski ada undang-undang yang mengatur untuk membolehkan seorang presiden melakukan kampanye namun diyakini hal itu tidak dilakukan Joko Widodo.

Relawan dari paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka DD Shineba menjawab semua tuduhan paslon lain, kalau pihaknya tidak pernah merasa menzalimi siapapun. Sehingga kalau merasa dizalimi, dicurangi harusnya diusut tuntas sehingga ketahuan siapa yang melakukannya. Bu-



caya survei-survei yang belum tentu menjamin tersebut.

“Survei itu kalau baru 43 persen itu tidak menjamin bisa nantinya turun jadi 42 persen atau 41 persen. Terkecuali kalau sudah 50 persen ke atas baru

kan main tuding sehingga menimbulkan fitnaji.

Dia menyebutkan bahwa di setiap paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3 juga ada menteri-menteri yang sekarang masih ikut berkuasa di negara Indonesia.

“Soal ketidaknetralan, saya rasa juga imbang banyak juga di paslon lain pejabat pemerintah ada disana. Menurut saya itu jadi merata dan imbang-imbang saja,” jawabnya.

Ketua Persaudaraan 98 Sumsel ini juga meragukan apakah Joko Widodo akan turun ikut kampanye mendukung Prabowo - Gibran. Meski ada aturan yang membolehkannya namun kesempatan itu sepertinya tidak dilakukan Jokowi.

“Saya tidak yakin dia (Jokowi) berkampanye. Sebab hari ini kami meyakini survei kami 40 persen ke atas. Ibaratnya cek ombak saja, berpengaruh tidak ternyata pengaruhnya besar,” tegasnya.

DD Shineba menilai paslon nomor urut 2 pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di atas dibandingkan pasangan

gan nomor urut 1 dan nomor urut 3.

Sehingga untuk apalagi mereka melakukan kecurangan di Pilpres karena malah merugikan mereka sendiri.

“Dari segi survei saja kami sudah sangat tinggi dari paslon lain jadi untuk apa curang dan untuk apa juga Jokowi harus turun ke jalan,” ucapnya sembari tertawa.

Menurut aktivis lingkungan ini, ada perbedaan antara Paslon 02 dengan Paslon 01 dan 03. Mereka menargetkan menang satu putaran karena dari survei memang menunjukkan hal itu. Hasil itu juga yang membuat mereka lebih semangat lagi untuk mewujudkan satu putaran.

Sedangkan Paslon 01 dan 03 secara realistis lebih nyaman untuk lolos dulu di dua putaran baru kemudian berpikir menang.

“Jadi ibaratnya, kompetisinya sama tapi mimpinya beda. Sekarang apabila benar dua putaran tinggal kedua paslon ini siapa yang akan masuk menjadi lawan kami. Kalau kami jelas satu putaran atau dua putaran silahkan saja, tetapi tetap kami optimis satu putaran. Jadi kami di Pilpres 2024 kami tidak panik karena kita diatas. Walaupun begitu tetap semangat berjuang,” pungkasnya.

## Merasa Dicurangi Sejak Awal

Wakil Ketua Tim Hukum Nasional (THN) AMIN Sumsel Ahmad Samudra menyebutkan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah biasa bahkan merasa telah dibesarkan oleh semua bentuk kezaliman di Pilpres 2024 ini. Namun dia enggan menyebut detail apa saja bentuk kezaliman yang didapat oleh Anies-Cak Imin AMIN.

“Salah satunya saat mau kampanye banyak sekali masalah yang didapatkan. Bahkan Anies Baswedan seakan dihalangi-halangi berkampanye banyak yang tidak jadi berangkat. Itu salah satunya saja jadi tanpa disebutkan yang lain intinya kita sudah terbiasa dibesarkan oleh kezaliman,” kata dia.

Samudra juga sependapat dengan perwakilan paslon nomor 3 menyebutkan demokrasi di Indonesia harus ditingkatkan. Kalau penyelenggara Pilpres 2024 berlangsung dengan beragam keterlibatan dan ketidaknetralan malu dengan generasi muda yang akan datang.

“Nilai demokrasi itu seharusnya semakin hari semakin ditingkatkan! Saya sepakat dengan Pak Agus Sutikno perwakilan dari paslon nomor urut 3 demokrasi ini harus kita junjung tinggi demi anak cucu kita,” ucapnya.

Samudra menganalogikan pemerintah Indonesia sekarang seperti orkestra yang harus memainkan lagu yang merdu dan enak untuk dinikmati oleh rakyat Indonesia. Namun sekarang pemimpin bangsa Indonesia Presiden Joko Widodo dinilai sebagai dirigen harus tetap bisa memainkannya minimal jangan sumbang.

“Setidaknya tidak sumbang biar bisa didengarkan jangan sampai suara tidak nyaman untuk didengarkan rakyat. Pilpres curang kita harus jaga, legitimasi ini yang harus kita jaga akan terjadi kegoncangan-kegoncangan di dalamnya,” ungkap dia. ●RDR





“Sehingga kami bukannya tidak percaya dengan hasil survei. Kita percaya survei tapi yang kredibel. Seperti di tahun 2019 misalnya, Jokowi selalu kalah tapi nyatanya malah jadi pemenang”

*Ahmad Al Azhar*



# KOMPETISINYA SAMA TARGETNYA BEDA

**Pelaksanaan pemilihan umum 2024 semakin dekat. Para peserta Pemilu dan para relawan semakin sibuk untuk memenangkan calonnya masing-masing baik itu di Pilpres maupun di pemilihan legislatif. Persaingan Pilpres 2024 bisa menjadi cukup menarik perhatian karena masing-masing mengklaim bisa meraih kemenangan.**

**N**amun meski sama-sama percaya diri akan menjadi pemenang namun target yang ingin mereka capai berbeda. Ada yang merasa menang cukup dengan satu putaran saja namun ada yakin kalau di putaran dua mereka unggul dan jagoannya menjadi pemimpin Indonesia berikutnya.

Di sisi lain para pendukung calon presiden juga meragukan netralitas pemerintah yang dianggap mulai memihak ke salah satu calon. Kemudian ketidaktegasan lembaga penyelenggara Pemilu juga menjadi perhatian karena dinilai melahirkan keputusan yang mengambang.

Kader pendukung pasangan Capres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Hernoe Roesprijadi sejauh ini mereka tetap optimis kalau pasangan AMIN akan lolos meski dari hasil survei mereka bukan menjadi yang pertama.

Keyakinan itu karena AMIN didukung sebagian besar masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) namun untuk menang satu putaran agak sulit.

“NU memang ada di dimana-mana baik di 02 ataupun 03 namun sebagian besar mereka mendukung pasangan AMIN. Soal hasil survei bukan saya tidak percaya tapi bisa saja metode yang digunakan salah karena banyak orang-orang NU ada di desa dan mereka tidak menggunakan handphone,” ungkap Hernoe yang juga salah satu tokoh NU di Sumatera Selatan dalam dialog politik Dinamika Elektoral Pilpres 2024 yang digelar Teras Indonesia.

Di sisi lain meski dalam hasil survei banyak yang mengunggulkan pasangan Prabowo - Gibran namun mereka yakin kekuatan sesungguhnya masih merata yakni belum ada yang mencapai 50 persen. Sehingga secara realistis Pilpres akan berlangsung dua putaran.

Diakui Caleg DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, pasangan AMIN harus bekerja

keras agar lolos di putaran kedua karena yang mereka hadapi adalah incumbent dalam bentuk pasangan Prabowo - Gibran. Sehingga mereka juga meragukan netralitas pemerintah karena tidak ada bapak yang tak mendukung anaknya.

“Ketidaknetralan ini bisa kita lihat mulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi kemudian ada keputusan dari KPU yang membolehkan Jokowi untuk berkampanye. Kalau presiden sudah boleh kampanye, apakah bisa dikatakan netral,” ujar Hernoe Roesprijadi.

Dia mengibaratkan, kalau presiden sudah memihak ke salah satu calon dengan alasan karena jabatan politik maka akan mempengaruhi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) karena pemimpin tertinggi mereka adalah presiden.

Demikian juga TNI/ Polri juga akan ikut terpengaruh karena pemimpin tertingginya ada di tangan presiden. Sehingga kedaulatan demokrasi itu bukan di tangan rakyat tapi di tangan pemimpin.

Hal ini terbukti banyak pendukung AMIN yang mengalami intimidasi terutama saat mereka diketahui membantu dalam bidang finansial. Mereka yang membantu dicari kesalahannya mulai dari pajak, prosedural usaha dan lainnya.

## Ada Migrasi Suara

Pandangan berbeda disampaikan Ketua Persaudaraan 98, DD Shineba yang merupakan relawan pendukung Capres 02, Prabowo - Gibran. Ada sugesti politik yang terus mereka gaungkan di Pilpres 2024 ini yakni menang satu putaran.

Target menang satu putaran ini bukan asal ucap tapi berdasarkan hasil survei yang semuanya memenangkan pasangan Prabowo - Gibran. Angka ke-

nangan juga tidak main-main yakni di atas 45 persen.

Selain itu banyaknya perubahan situasi politik yang menguntungkan Prabowo - Gibran dengan terjadinya migrasi politik besar-besaran. Migrasi dukungan Maruarar Sirait dan Khofifah Indar Parawansa menunjukkan adanya pergeseran suara dari Ganjar - Mahfud ke Prabowo - Gibran.

“Kalau ada kemungkinan dua putaran yah tidak masalah tapi kami yakin akan menang dengan satu putaran. Ibaratnya kita ini ada di kompetisi yang sama tapi mimpinya berbeda. Kalau kita mimpinya satu putaran jadi wajar rasanya,” ujar Shineba.

Aktivistis pergerakan 98 ini mengungkapkan, saat awal memang kekuatan terasa sama namun sekarang suara dari 03 terlihat terjun bebas setelah Gibran bersama Prabowo Subianto. Suara 02 semakin besar dengan adanya migrasi pemilih dari Jokowi ke Prabowo. Sedangkan suara untuk Prabowo tidak berubah.

“Artinya kalau pada hari ini para pemilih sudah menetapkan pilihannya. Sementara ada pemilih unidentified sekitar

6 persen, kalau mereka ini dibagi rata maka suara Prabowo - Gibran bisa mencapai 54 persen. Bahkan migrasi sudah kita anggap selesai karena pemilih Prabowo tetap ke Prabowo sementara pemilih Jokowi pindah ke Gibran,” terangnya.

Terkait netralitas, Shineba masih percaya kalau Jokowi sebagai Presiden akan bersikap netral karena faktanya hingga kini dia belum pernah mengucapkan dukungannya kepada Gibran Raka-

buming Raka. Di sisi

lain jabatan presiden, kepala daerah adalah jabatan politis sehingga sah-sah saja mereka berkampanye. Bahkan di Pilpres 2019, Jokowi juga melakukan kampanye padahal saat itu jabatannya sebagai presiden.

“Kenapa di Pemilu 2024 ini dipertanyakan. Demikian juga kalau kepala daerah mau kampanye, boleh karena jabatan politik. Yang tidak boleh itu penjabat gubernur, penjabat bupati karena berstatus ASN,” tegasnya.

Meski dibolehkan namun Shineba juga tidak yakin kalau Jokowi akan melakukan kampanye untuk 02, Prabowo - Gibran

la menambahkan Pemilu 2024 ini juga memperebutkan suara di kolam yang sama yakni anak muda yang mencapai 53 persen suara. Semua hasil survei menyebutkan suara terbesar berasal dari anak muda dan Gen Z.

“Karakter anak muda ini beda. Mereka tidurnya tengah malam bangunnya sore. Kalau itu terjadi maka hasil surveinya bu-  
yar semua karena banyak yang tidak mencoblos,” kata Shineba.

## Hasil Survei Bukan Penentu

Keyakinan untuk menang juga disampaikan kader partai pendukung pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Walaupun saat ini menurut hasil survei calon mereka selalu kalah dari Prabowo Gibran namun hal tersebut bukan jaminan mereka kalah.

Bahkan hal ini menurut Ketua DPD Partai Hanura Sumsel, Ahmad Al Azhar sebagai penyemangat mereka untuk solid mendukung Ganjar - Mahfud di Pilpres.

Di sisi lain mereka juga bersikap realistis dengan menargetkan lolos di putaran kedua Pilpres. Dimana persaingan ketiga pasangan ini sebetulnya cukup ketat dan punya peluang sama-sama untuk menang.

“Sehingga kami bukannya tidak percaya dengan hasil survei. Kita percaya survei tapi yang kredibel. Seperti di tahun 2019 misalnya, Jokowi selalu kalah tapi nyatanya malah jadi pemenang. Jadi kami bukan tidak percaya tapi ada beberapa catatan soal survei ini,” terang Caleg DPR RI ini.

Azhar juga melihat mulai banyak kecurangan yang terjadi sehingga mereka tidak yakin apakah Prabowo - Gibran itu memang unggul karena sungguhan atau dengan banyak catatan. Banyak intimidasi yang dilakukan mulai dari ASN, lembaga pemerintah hingga lembaga penyelenggara. Sehingga kalau ada yang merasa yakin menang satu putaran wajar saja karena semua ikut terlibat termasuk dari pemerintah sendiri.

“Jadi bagi kami pendukung Ganjar - Mahfud, kita tidak perlu terpengaruh dengan opini satu putaran. Kalau memang yakin menang satu putaran mengapa masih ada intimidasi seperti yang terjadi selama ini. Untuk itu kami yakin sekali akan berlangsung dalam dua putaran,” tegas Azhar.

Secara pribadi Azhar juga yakin kalau berlangsung dua putaran maka akan terjadi persaingan antara 02 dan 03 untuk memperebutkan kursi Presiden dan Wakil Presiden. ●RDR







“Sebetulnya satu atau dua putaran itu sama saja. Kalau alasan satu putaran hanya agar bisa menghemat anggaran, rasanya itu omong kosong kalau memang pemenangnya sudah ditentukan”

**M Husni Thamrin**

# SATU ATAU DUA PUTARAN TIDAK ADA BEDANYA

**Saling klaim untuk berhasil menang satu putaran terus digaungkan para pendukung calon presiden khususnya dari pasangan 02, Prabowo - Gibran. Banyak pihak yang meragukan Prabowo - Gibran akan menang satu putaran karena situasinya berbeda dengan Pemilu sebelumnya.**

**D**i sisi lain keyakinan pendukung Prabowo - Gibran semakin meningkat setelah melihat hasil survei yang dilakukan lembaga penghitung kemungkinan tersebut. Baik lembaga yang kredibel maupun tidak sama-sama mengunggulkan 02 sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan persentase di atas 45 persen.

Sedangkan pasangan 01 Anies - Gus Muhaimin dan 03 Prabowo - Ganjar lebih bersikap realistis dengan meyakini mereka akan lolos di putaran kedua.

Pasangan 02, Prabowo - Gibran cukup wajar kalau mengklaim bisa menang satu putaran karena mereka diperkuat banyak partai, mendapat dukungan moral dari Joko Widodo. Dimana meski belum menyatakan dukungan langsung namun Jokowi adalah ayahnya Gibran sehingga sangat kasat mata arahnya kemana.

Pengamat politik dan kebijakan DR M Husni Thamrin, kekuatan para pasangan calon sebetulnya seimbang. Namun perbedaan itu akan terlihat dalam prosesnya, siapa yang paling kuat didukung kader partai, mesin partai pendukung berjalan atau tidak serta keyakinan dari orang-orang di sekelilingnya.

“Sebetulnya satu atau dua putaran itu sama saja. Kalau alasan satu putaran hanya agar bisa menghemat anggaran, rasanya itu omong kosong kalau memang pemenangnya sudah ditentukan,” ungkap Thamrin.

Dalam pengamatannya, Pilpres 2024 memenangkan paslon 02 dalam satu putaran mungkin saja bisa terjadi. Ada beberapa beberapa hal yang harus mendukungnya seperti disiplin partai politik dan kadernya dalam mendukung Paslon serta faktor kepatuhan terhadap Joko Widodo. Tapi hal itu juga tidak cukup karena perlu

dukungan-dukungan lain.

“Kemudian kalau lihat angka survei bisa saja hasilnya ia (satu putaran). Tapi dalam membaca hasil survei kita harus mempertimbangkan fluktuasi situasi. Ibarat bermain saham, bisa saja hari ini nilai melambung tinggi tapi kemudian tiba-tiba anjlok,” kata salah satu dosen senior di Universitas Sriwijaya ini.

Fluktuasi suara itu cepat berubah karena Pemilu 2024 didominasi kaum Gen Z dan kaum milenial karakternya tidak tetap dan cenderung melihat situasi. Anak muda hari ini mungkin senang K - Pop tapi besok tahu-tahu berubah mengagumi Pink Floyd. Artinya fluktuatif cukup tinggi.

“Kemudian kita bisa lihat sendiri banyak kader-kader partai jarang memasang spanduknya disertai gambar Capres. Mereka lebih suka menempel gambar ketuanya daripada Capres. Artinya ini juga bisa mempengaruhi,” ungkapnya.

Sementara pengamat politik dari Stipol Candradimuka Palembang, Ade Indra Chaniago mengatakan, para kader partai pendukung 01 dan 03 tidak perlu berkecil hati dengan sugesti politik yang dilontarkan 02 dengan menargetkan diri menang satu putaran.

Menurut dia, hasil survei bukanlah sesuatu menentukan karena ada banyak kasus menunjukkan sesuatu berbeda. Salah satunya pencalonan Anies Baswedan di DKI Jakarta yang tidak satu survei memenangkannya. Namun hasilnya diluar dugaan karena Anies malah menang di DKI Jakarta.

Sehingga ada kemungkinan situasi tersebut kembali berulang lagi karena semuanya masih ada peluang untuk menang.

Sementara di Pilpres 2024 ini lanjutnya pasangan Prabowo - Gibran memang sedikit diuntungkan karena bisa dikatakan sebagai incumbent atau menjadi fotokopi dari pemerintahan Joko Widodo.

“Tinggal bisa tidak pasangan 01 dan 03 mengimbanginya. Kalau bisa yah kemungkinan berlangsung dua putaran,” ucapnya.

Terkait netralitas, semua bisa dilihat kalau seluruh perangkat pemerintah baik langsung maupun tidak langsung juga ikut terlibat. Semua jadi pemain mulai kader partai hingga perangkat, RT dan RW juga ikut bermain.

Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Eddy Santana Putra juga meyakini kalau Prabowo - Gibran akan menjadi pemenang di Pilpres 2024. Kedua sosok itu saling menguatkan dalam mendulang suara.

Prabowo Subianto dikenal sebagai politisi yang mampu menghimpun semua kalangan dan sosok yang dapat menyatukan bangsa. Sehingga kalau dia garis keras maka tidak akan mau bergabung dengan Jokowi.

“Ditambah lagi sosok Gibran Rakabuming Raka yang disenangi para anak muda. Sehingga kalau siapa yang disebut pasangan fenomenal yah Prabowo - Gibran, yang satunya dari kalangan tua dan satu lagi dari kalangan muda. Jadi siap menyambut dan menjembatani kepemimpinan

untuk masa depan Indonesia,” terang ESP.

Melihat antusias masyarakat dalam memilih pasangan Prabowo - Gibran, Walikota Palembang periode 2003 -2013 ini yakin akan menang satu putaran. Ada banyak keuntungan kalau satu putaran diantaranya menghemat biaya, gejolak politik tidak terlalu panas dan cepat terjadinya rekonsiliasi.

“Apalagi kita mau puasa, waktu dan energi juga banyak habis kalau satu putaran serta hemat anggaran. Kemudian cepat selesai dan kita bisa kembali bersama-sama menata bangsa ini kembali,” ujar Eddy.

Anggota Komisi 5 ini mengungkapkan optimisme mereka pada Prabowo - Gibran sangat tinggi. Selain bisa melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi pasangan 02 ini juga bisa menyatukan antara kaum muda dan tua sehingga estafet kepemimpinan bisa berlangsung.

Menanggapi soal kecurangan yang akan mungkin terjadi, Eddy Santana Putra menilai semua punya potensi melakukan hal itu namun pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung transparan dan terang. Semua bisa ketahuan saat bermain curang.

“Seperti ada dugaan kertas suara yang sudah dicoblos di Taiwan ternyata bukan suara untuk Prabowo

- Gibran. Kita berbaik sangka saja, mungkin ada unsur ketidaksejajaran. Itu saja,” ujarnya.

Eddy Santana Putra juga menilai pelaksanaan Pemilu 2024 lebih kondusif, lebih santai dan riang gembira. Situasi ini beda jauh dengan 2024 lalu.

●RDR





“Mau satu putaran atau dua putaran kami optimis AMIN yang akan menang di Sumsel dengan target kemenangan 70 persen”



*Muhammad Toha*

# YAKIN AMIN MENANG BESAR, WONG SUMSEL BUTUH PERUBAHAN

**Mesin politik dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP merasa optimis Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa menenangkan jagoannya di Sumatera Selatan. Antusiasme masyarakat terhadap kehadiran Anies Baswedan menunjukkan bahwa Sumatera Selatan memang membutuhkan perubahan.**

Untuk itu para kader partai pendukung yakin kalau pasangan nomor 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) akan unggul di Sumatera Selatan. Bersarnya respon warga Sumsel pada AMIN menjadi semangat kader untuk berjuang lebih keras lagi agar bisa menang di kontestasi Pilpres 2024.

Seperti dikatakan Caleg DPRD Sumsel Dapil 7 Partai Nasdem Didi Epriadi, mereka optimis target kemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Sumsel. Kendati kemenangan itu satu putaran atau harus berlaga kembali di dua putaran Pilpres 2024 namun tidak masalah.

“Kenapa Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa menang karena wong Sumsel butuh perubahan. Tidak mau dipimpin dengan cara lama. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjanjikan perubahan untuk Indonesia lebih sejahtera itu yang diharapkan semua wong Sumsel,” kata dia.

Dia melihat sendiri masyarakat Sumsel mengeluh dengan kebutuhan pokok yang sangat sulit didapatkan dengan harga mahal dan beragam kelangkaan sembako. Masyarakat Sumsel disebutkan tidak mau lagi semua itu terulang 5 tahun kedepan, faktor fundamental adalah kehidupan semakin sulit dibikin sulit dengan susahnyanya mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari.

“Peluangnya cukup besar keinginan untuk dilakukannya perubahan responnya sangat positif di Sumsel. Terus lagi masyarakat Sumsel mengeluh perekonomian sendi-sendi keluarga sangat susah. Siapa lagi ingin kembali ke era lama, masyarakat Sumsel butuh perubahan yang dijanjikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,” tegasnya.

Dia menilai figur Anies Baswedan sebenarnya tidak hanya terkotak-kotak oleh politik identitas yang dilihat dan dinilai beberapa kelompok atau individu. Baginya figur

Anies Baswedan sangat bhinneka tunggal Ika tidak hanya dikenal dengan terfokus dalam kelompok tertentu saja.

“Figur Anies Baswedan lintas bangsa Bhinneka Tunggal Ika tidak ada terkotak-kotak yang dirumorkan. Dia sebenarnya sosok perekat antar suku agama dan ras tidak ada tanggapan terkotak satu tempat saja,” ucap Caleg DPRD Sumsel Dapil 7 Partai Nasdem wilayah Kabupaten Lahat, Pagaralam dan Empat Lawang ini

Disisi lain dia juga melihat masyarakat Sumsel sudah sangat mencintai Anies Baswedan karena efek dari jiwa kepemimpinan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tidak ada kesombongan dari dirinya saat menjadi pemimpin yang dicintai oleh penduduk DKI Jakarta saat itu.

“Dia pemimpin yang memiliki prinsip kuat, saat menjadi pemimpin fokus bekerja. Tidak ada sesuatu yang kita lihat di Jakarta selain Anies Baswedan selalu bekerja. Itu juga dilihat oleh masyarakat di Sumsel menilai beliau,” tuturnya.

Dia optimis juga adanya dukungan para ulama bisa meningkatkan keyakinan masyarakat pilih mereka benar-benar menjadi tepat. Baginya sebagai masyarakat tentunya sangat yakin paslon dengan didukung tokoh agama bahkan seluruh alim ulama di Sumsel.

“Kita optimis ketokohan ulama bahwasanya ulama ini saya rasa pertimbangan mereka sangat-sangat matang untuk menentukan pilihan. Terlebih juga ini sangat berguna untuk masyarakat dari aspek keyakinan menentukan pilihan,” pungkasnya.

Sementara Caleg DPRD Sumsel Dapil 1 Partai PKS Muhammad Toha sangat yakin walaupun survei paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tidak terlalu bagus na-

mun bisa membuat kejutan nantinya. Kejutan yang dimaksudkan semua target pada saat kampanye akan terjawab Anies Baswedan terpilih sebagai Presiden dan Muhaimin Iskandar menjadi Wakil Presiden di Pilpres 2024.

“Mau satu putaran atau dua putaran kami optimis AMIN yang akan menang di Sumsel dengan target kemenangan 70 persen,” kata Caleg DPRD Sumsel Dapil 1 wilayah Kecamatan Bukit Kecil, Ilir Barat 1, Ilir Barat 2, Gandus, Plaju, Seberang Ulu 2, Seberang Ulu 1, Jakabaring dan Kertapati ini.

Toha juga menjabat sebagai Ketua DPW PKS Sumsel ini, menyatakan saat Anies Baswedan datang ke Palembang terlambat karena macet akibat masyarakat Palembang dari seluruh Sumsel yang datang ingin melihatnya.

Bahkan jalan menuju ke plaza Benteng Kuto Besak (BKB) merupakan balai kota pusat berkumpul Wong Kito julukan warga Palembang itu padat.

“Anies Baswedan dicintai oleh masyarakat Palembang buktinya jalan macet. Pas Pak Anies Baswedan menuju ke BKN sesak dipenuhi semua manusia yang hadir untuk melihatnya. Dari sana saja antusias masyarakat kepada beliau tinggi sekarang. Dari sana juga kami dari PKS optimis Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan menang,” tuturnya.

Toha sekarang tengah melakukan gerakan pribadi yang dilakukan bersama para kader PKS di Sumsel untuk menepis kalau Anies Baswedan hanya terfokus kepada

umat Islam saja. Karena Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta salah satu pemimpin di era saat itu yang memberikan izin pembangunan gereja dan tempat ibadah non agama Islam lainnya.

“Ada orang dari agama kristen bukan Islam membuat video di tiktok menyebutkan Pak Anies satu-satunya Gubernur di DKI Jakarta memberikan izin pembangunan gereja sebelumnya itu sulit. Tetapi saat Pak Anies menjabat pembangunan rumah ibadah selain agama Islam lancar. Nah video itu saya suruh agar kader PKS menyebarluaskan ke medsos biar masyarakat luas tahu Anies Baswedan tidak berpolitik identitas,” jelasnya.

Dia tidak ingin dukungan besar para ulama kepada Anies Baswedan menjadi hambar karena dinilai Anies-Cak Imin AMIN menggunakan politik identitas hanya untuk fokus ke umat Islam saja. Sebagai Presiden nantinya Anies Baswedan juga akan memikirkan semua umat beragama di tanah air.

“Orang mau berkata apapun sah-sah saja tetapi kami ada bukti video tiktok tadi yang akan kita terus sebar biar semua masyarakat di Sumsel khususnya tahu,” jelasnya.

Terakhir optimis PKS tentang kemenangan AMIN juga semakin tinggi karena dukungan para ulama se-Sumsel. Bagi

Muhammad Toha para ulama memiliki cabang yang cukup luas mulai dari pedesaan perkampungan bahkan lorong-lorong kecil di seluruh Sumsel.

“Biasanya kalau jamaah atau santri kalau gurunya memberikan perintah pasti akan mengikuti. Nah ini dukungan ulama se Sumsel sangat membuat kami optimis AMIN menang nantinya,” pungkasnya. ●RDR







“Gemoy Prabowo itu adalah gimmick yang diciptakan untuk menarik perhatian Gen Z dan upaya itu sukses. Hampir semua Gen Z di Sumsel lebih tertarik dengan pasangan nomor urut 2 karena label Gemoy Prabowo tersebut”

Fatkurohman

# GEMOY KUASAI SUARA GEN Z

**Gimmick politik yang dimainkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diakui mampu menguasai pikiran-pikiran anak muda. Politik yang tidak rumit, bergaya santai dan menyenangkan seperti Goyang Gemoy menjadi pilihan kaum milenial dan Generasi Z (Gen Z).**

Sehingga tidak heran gimmick yang diperagakan Prabowo bisa menggaet simpati anak muda meski usianya lebih tua dari para calon presiden lain. Ditambah kehadiran Gibran yang dianggap benar-benar mewakili anak muda.

Sehingga Gen Z di Sumatera Selatan diprediksi suaranya telah dikuasai paslon Prabowo - Gibran. Politik Gemoy ala Prabowo itu sangatlah mempesona di hati kaum anak muda hingga viral di kalangan mereka.

Hasil pengamatan koordinator wilayah lembaga survei dan kajian politik k kebijakan Public Trust Institute (Putin) Sumsel, Fatkurohman menyebutkan hampir semua Gen Z di Sumatera Selatan suaranya dikuasai Prabowo Subianto.

“Suara kaum Gen Z di Sumsel tinggi mendukung Prabowo Subianto di Pilpres dengan gimmick Gemoy. Namun untuk data pasti hasil survei berapa persentase belum selesai. Namun kalau di persentase suara di Sumsel, Gen Z itu ada 20 persen dan milenial ada di 30 persen dari 50 persen suara di Pilpres 2024,” kata dia.

Dilanjutkannya Gemoy ala Prabowo adalah salah satu gimmick yang sengaja dibentuk sebagai marketing oleh tim sukses atau tim pemenangan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Gimmick adalah upaya untuk menarik perhatian, istilah gimmick sering didengar di televisi hingga ke dunia politik.

“Gemoy Prabowo itu adalah gimmick yang diciptakan untuk menarik perhatian Gen Z dan upaya itu sukses. Hampir semua Gen Z di Sumsel lebih tertarik dengan pasangan nomor urut 2 karena label Gemoy Prabowo tersebut. Bahkan di kalangan mereka sangat viral mulai di sosmed atau dunia maya sampai kehidupan real contohnya online shop juga menjual pernak pernik Gemoy ala Prabowo yang dibeli kaum Gen Z,” tuturnya.

Trik branding Gemoy ala Prabowo Subianto terbentuk setelah kaum Gen Z melihat tingkah laku Ketua Umum Partai Gerindra itu dalam beberapa kesempatan terutama, aksi menggemaskannya

saat berjoget. Ditambah lagi, pipinya yang chubby dan perawakannya yang tambun sangat memancing Gen Z.

Selanjutnya dengan marketing tim sukses mengemas Prabowo Subianto menjadi anime dan membuat animasi membuatnya semakin membuat Prabowo menggemaskan di mata Gen Z.

“Tim dari paslon nomor urut 02 Prabowo dan Gibran sangat pandai membalut itu menjadi Gimmick politik yang baik. Dibandingkan paslon lain disini keunggulan nomor urut 2 bisa merangkul suara Gen Z,” ungkapnya.

Diakunya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak hanya menggunakan Gimmick Gemoy beragam trik lainnya dilakukan untuk menarik perhatian Gen Z dan kaum milenial. Saat debat Cawapres gesture tubuh Gibran disinyalir salah satu gimmick untuk mendapatkan perhatian khusus untuk kaum muda di plafon sosial media (sosmed) mulai dari Instagram sampai Tiktok.

“Karena potongan dari gestur tubuh Gibran debat Cawapres viral di sosmed! Di sosmed itu tempatnya kaum Gen Z dan kaum milenial. Nah itu juga langkah gimmick untuk mencari perhatian yang telah disusun secara sistematis pastinya,” ucapnya.

Namun Prabowo Subianto dinilai belum mampu menguasai kaum milenial di Sumsel hanya kaum Gen Z yang tertarik gimmick politik Gemoy tersebut. Dia menjelaskan kaum milenial telah diisi oleh kaum pemikir yang tidak bisa terhasut hanya dengan sebuah Gimmick saja.

“Gen Z itu kira-kira anak SMA sampai mahasiswa semester awal sekitar umur 17 tahun sampai 25 tahun kita sebutlah pemilih pemula. Kalau kaum milenial mahasiswa semester akhir dan orang dewasa telah bekerja umurnya mulai dari 25 tahun sampai 40 tahun. Artinya wajar kalau kaum milenial tidak terpengaruh gimmick Gemoy ala Prabowo karena mereka karakter lebih rasional telah dewasa,” pungkasnya.

Sementara menurut Putri sebagai perwakilan kaum Gen Z mengakui sangat menyukai pasangan nomor urut 02 karena faktor Gemoy ala Prabowo tersebut.

Dia melihat sosok Prabowo yang lucu dan menggemaskan akan lebih cocok menjadi presiden dinilai lebih nyaman untuk kaum Gen Z.

“Ya suka Prabowo karena saat ada Gemoy itu bahkan gambar-gambar kartun Prabowo lucu-lucu,” kata Koordinator Sasttra Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Seni dan Budaya Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) ini.

Mahasiswa Fakultas Ekonomi ini merasa Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok yang tegas dan berwibawa bisa juga bersikap menggemaskan mulai dari aksi joget dilakukan sampai poster-poster lucu kampanye yang tersebar.

“Mungkin karena itulah jadi kita suka saja membuat senang kalau sosok presiden nantinya bisa lebih dekat dengan kaum

Gen Z,” jelasnya.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palembang Candra menilai adanya gimmick-gimmick dilakukan paslon tentunya baginya sah-sah saja.

Menurutnya itu merupakan sebuah strategi politik untuk mendapatkan popularitas baik itu di kalangan pemuda dan juga tua, masyarakat akan mudah untuk mengingat dan juga akan memantik kontroversi di kalangan masyarakat.

Ketika itu terjadi maka berhasil strategi politik yang dilakukan oleh tim pemenangan tetapi yang harus sama-sama dibenahi untuk bangsa bukan hanya sekedar popularitas tetapi kapasitas seorang pemimpin yang akan memimpin bangsa.

“Indonesia negara yang luas dan mempunyai berbagai suku budaya adat, dan sudah itu akan ada permasalahan dari setiap daerah, terutama di bidang perekonomian, pendidikan dan kesehatan, ini yang harus dituntaskan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Dia memberikan himbauan kepada kaum muda untuk fokus mencari pemimpin yang lebih diutamakan oleh bangsa bukan hanya sekedar termakan oleh Gimmick.

Dia berkata generasi muda pada hari ini memegang peran yang sangat penting untuk menentukan nasib bangsa Indonesia ini untuk kedepannya, 55 persen pemilih didominasi oleh generasi muda.

Untuk itu dia berharap agar lebih cerdas dalam memilih seorang pemimpin, karena jika salah memilih akan menyebabkan 5 tahun kesengsaraan untuk masyarakat dan bangsa ini.

Shiddiq (Jujur), Amanah (dapat dipercaya), Tabligh (menyampaikan amanah), dan Fathonah (cerdas) itu kriteria pemimpin yang baik’ dan harus dipilih.

•RDR





“Jadi, kontestasi pemilu ini membuat beberapa pejabat negara, presiden, menteri, kepala daerah jadi punya potensi dimaknai kalau pejabat negara kampanye ngajak pilih calon, pilih partai di 2024 ini tidak apa-apa, padahal hukumnya enggak bilang gitu”

Usep Hasan Sadikin



# PRESIDEN BOLEH KAMPANYE BAWASLU WANTI-WANTI JOKOWI

**Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait presiden boleh berkampanye menimbulkan kontroversi baru jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan sudah pernah menyurati Jokowi terkait batasan-batasan yang boleh dilakukan presiden-menteri saat kampanye pada Pemilu 2024.**

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menuturkan, surat tersebut diberikan sebelum Jokowi melontarkan pernyataan terkait presiden boleh ikut kampanye. “Kami mengingatkan, memberikan imbauan kepada Pak Presiden. Pertama, menteri-menterinya yang ada pada kewenangan beliau, juga tindakan-tindakan ke depan dalam kampanye,” kata Bagja di Kantor DKPP, Jakarta, Jumat, 26 Januari 2024.

Dia menilai pernyataan Jokowi terkait presiden boleh berkampanye, tak melanggar Undang-Undang Pemilu. Sebab itu, Bagja menilai pernyataan tersebut tidak bisa dinilai berpihak.

“Seakan berpihak bagaimana? Kan, enggak. Kalau secara hukum enggak bisa dibilang seakan berpihak loh dia (Jokowi),” ungkap Bagja.

Bagja menduga ucapan Jokowi yang menyebut presiden boleh berkampanye dan memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara mengutip Undang-undang. “Tidak boleh menggunakan fasilitas negara, ya betul, kan, di Pasal 281 itu. Ya, kalau penerjemahannya lain lagi, silakan lah ahli politik yang lain,” ucap Bagja.

Bagja juga menilai pernyataan Jokowi itu belum cukup diduga melanggar UU kepemiluan. Sementara itu, Bagja menanggapi terkait laporan dugaan Jokowi melakukan pose dua jari di mobil RI-1. Dia menuturkan, rekaman tersebut perlu dilakukan analisis untuk memastikan hal tersebut dilakukan Jokowi.

“Pertanyaannya, kalau Bu Iriana bagaimana? Pejabat negara atau tidak Bu Iriana?” kata Bagja.

Bagja mengatakan persoalan utamanya adalah bukan soal pose dua jari dari mobil Jokowi, yang notabene fasilitas negara, tetapi siapa sosok yang mengacungkan salam pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran

Rakabuming.

Bagja menuturkan jika pun nanti ada unsur pidana dari pose dua jari itu, Bawaslu akan menyerahkan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). “Nanti juga kalau misalnya ada unsur pidana ke depan, pasti kami akan mengajukannya ke Sentra Gakkumdu, untuk pembahasan bersama polisi dan jaksa. Kadang-kadang, kan, ketika kami nyatakan diduga, teman-teman polisi kan tidak. Itu kan pembahasan di Sentra Gakkumdu,” kata Bagja.

Bagja menegaskan, pihaknya tidak akan pandang bulu dalam mengawasi tahapan kampanye, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu hingga presiden sekalipun.

“Kami akan mengawasi jika Pak Presiden melakukan hal-hal yang dilarang. Apa yang dilarang? Menggunakan fasilitas pemerintah,” ujar Bagja.

Bagja mengatakan, sampai saat ini belum ada informasi bahwa Presiden Jokowi akan cuti kampanye. Kata dia, pernyataan Presiden Jokowi tidak bisa diterjemahkan secara hukum bahwa yang bersangkutan mau mengajukan cuti.

“Presiden kan ngomongnya enggak kliir itu. Bukan cuti. Ma u

berkampanye,” imbuhnya.

Dia mengatakan, Bawaslu sudah memberikan imbauan kepada presiden dan para pejabat negara terkait aturan dalam berkampanye. Salah satunya terkait pejabat teras di partai politik yang membagi-bagikan bantuan sosial di masa kampanye.

“Hal itu tidak dilarang selama acara tersebut bertajuk acara kementerian. Kalau bukan acara menteri, pakai acara negara, fasilitas negara, itu kena (pelanggaran),” tegas Bagja.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Usep Hasan Sadikin, mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi bahwa presiden hingga menteri boleh ikut kampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara sangat kontroversial. Sebab, pernyataan tersebut berefek domino hingga ke pejabat negara tingkat daerah.

“Jadi, kontestasi pemilu ini membuat beberapa pejabat negara, presiden, menteri, kepala daerah jadi punya potensi dimaknai kalau pejabat negara kampanye ngajak pilih calon, pilih partai di 2024 ini tidak apa-apa, padahal hukumnya enggak bilang gitu,” katanya.

Dia menyayangkan pernyataan RI 1 tersebut. Apalagi, sebelumnya juga pernah mengatakan bakal ikut cawace dalam Pilpres 2024. Usep menekankan, pejabat sesuai dengan UU Pemilu yang dinukil

Jokowi mesti mengajukan cuti.

Usep pun mengingatkan Jokowi bahwa sebagai presiden mestinya menyadari posisinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Seharusnya, Jokowi bisa menjamin dengan kewenangannya agar Pemilu 2024 berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan sesuai dengan kepastian hukum.

“Sehingga menciptakan iklim kontestasi pemilu yang memang setara dan berdasarkan hukum,” katanya.

Direktur Eksekutif Lingkaran Madani (Lima), Ray Rangkuti, tidak yakin Bawaslu berani menindak Presiden Jokowi jika nantinya melakukan pelanggaran saat mengikuti kampanye. Seperti pelanggaran lainnya, Bawaslu juga hanya mencatat peristiwa tanpa ada tindak lanjutnya.

Dia menyebut ragam bentuk pelanggaran begitu banyak dan hal ini sangat menyedihkan, mulai dari perilaku tidak netral Aparatur Sipil Negara (ASN), bansos yang dipolitisasi, termasuk hambatan yang dialami kandidat lain.

“Pak Jokowi ini seperti meruntuhkan banyak hal yang berhubungan dengan demokrasi. Dia mempromosikan dinasti politik yang meruntuhkan gerakan anti nepotisme, membuat KPK lumpuh, sekurang pemilu menuju ke arah yang terburuk sepanjang reformasi,” jelas Ray.

Peneliti senior dari PUSAKO, Feri Am-sari, mengatakan, pernyataan Jokowi terkesan memang tidak menabrak aturan selama mematuhi Pasal 281 UU Pemilu jika melakukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.

“Tapi problematiknya bukan problem normatif peraturan perundang-undangan. Problemnya, kerusakan etika dan moral,” kata Feri, Jumat, 26 Januari 2024.

Feri menekankan beberapa hal soal etika dan moral. Pertama, Jokowi berpotensi besar mendukung anaknya, Gibran Rakabuming yang notabene cawapres pasangan nomor urut 02. Hal itu dinilai sebagai kerusakan politik karena kewenangan partai tidak berjalan. Ia beralasan, Jokowi yang kader suatu partai tetapi mendukung kader partai lain.

“Ini kan kerusakan etika berpolitik, berpartai dan menjalankan wewenang kekuasaan bernegara. Letaknya adalah panggilan etika dan moral dan sampai saat ini presiden tidak menjalankan nilai-nilai moral, bahkan memberikan contoh etika dalam praktek bernegara,” kata Feri.

•RDO







“Debat memberi pengaruh iya, tapi beberapa data yang saya lihat undecided voters itu masih tinggi. Artinya banyak yang menanti sampai dua minggu terakhir”

*Aditya Perdana*

INFO  
KPU

Minggu V • Januari 2024

23

# CAPRES JANGAN BANYAK GIMIK

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan aturan teknis dan format debat kelima Pilpres 2024 masih sama seperti debat-debat sebelumnya meskipun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan acara debat tanpa ada penonton.**

“Format debat, termasuk penyelenggaraannya, tetap. Tetap ada tim sukses pasangan calon yang jumlahnya 75 orang. Jadi, tetap,” kata Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, di Jakarta, Kamis, 25 Januari 2024.

Hasyim menjelaskan, KPU telah mengevaluasi penyelenggaraan debat keempat yang berlangsung pada 21 Januari 2024. Masing-masing pasangan calon telah menyampaikan catatannya dalam rapat evaluasi itu.

“Nanti dalam kesempatan berikutnya, KPU akan melakukan rapat dengan TV penyelenggara debat terakhir yang kelima, dan nanti juga akan ada rapat selanjutnya yang mempertemukan antara KPU, tim pasangan calon, dan pihak televisi yang akan menyelenggarakan debat,” kata Hasyim.

Debat kelima, yang bakal menampilkan tiga calon presiden di atas panggung, menjadi sesi debat resmi terakhir yang digelar oleh KPU selama masa kampanye Pilpres 2024. Debat kelima itu dijadwalkan berlangsung pada 4 Februari 2024. Beberapa tema yang diangkat dalam debat terakhir itu, di antaranya soal kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan inklusi.

Pengamat politik, Rendra Setyadiharja, menuturkan, dengan sisa satu debat lagi, masyarakat diharapkan sudah mampu dan sudah memiliki referensi untuk memilih pemimpin negara lima tahunan yang waktunya kurang dari satu bulan ke depan.

Rendra mengatakan, empat debat yang sudah dilewati bisa menjadi jalinan referensi bagi masyarakat untuk memilih dengan menilai para capres-cawapres yang telah menyalurkan visi misi dan adu argumen dalam tema tema yang telah dipilih.

“Ini saya kira bisa menjadi satu referensi bagi masyarakat, debat ini akan menjadi satu jalinan pengetahuan bagi masyarakat. Mungkin ada masyarakat yang melihat debat tadi malam tidak melihat secara utuh, tetapi dari debat debat yang lain masyarakat sudah menilai tiga capres cawapres ini ada plus-minusnya,” ucap Rendra.

Rendra meluruskan bahwa masyarakat tentu harus melihat debat secara keseluruhan alias

tidak menilai karakter capres cawapres secara per debat. Sebab tema yang satu dengan lainnya jelas merupakan jalinan pemikiran konstruktif yang meliputi seluruh aspek dalam menjalankan Negara.

“Mungkin ya kalau kita nilai di setiap debat ada yang unggul, ada yang kalah, atau zero semua, tapi itu tadi, kita tidak bisa melihat secara parsial atau per debat, karena tema ini merupakan jalinan satu pemikiran konstruktif bagi negara ini, ada ekonomi, ada pertahanan dan kemanan, semuanya lah satu jalinan pembangunan yang akan dilakukan di Indonesia,” ujar Rendra.

Pengamat dan akademisi Universitas Bandar Lampung (UBL), Rifandy Ritonga, berharap pada debat capres terakhir masing-masing calon bisa fokus menyampaikan visi misi dan program. Rifandy menyebut, tema debat cawapres pada 21 Januari 2024 kurang dieksplor. Padahal tema-tema itu bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Seharusnya, kata Rifandy, para calon bisa lebih banyak menyampaikan gagasan dan solusi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, dia menilai justru lebih banyak gimik ditampilkan. Malah gimik-gimik itu menurutnya tidak sejalan dengan tujuan awal debat untuk argumentasi mencari solusi untuk kepentingan bangsa.

Masih ada satu debat terakhir yang akan diikuti oleh capres. Berkaca dari debat cawapres terakhir, Rifandy berharap masing-masing calon bisa lebih menyampaikan visi misi dan program dan mengurangi gimik yang tidak substantif, apalagi sampai merendahkan lawan debat.

“Kita berharap, debat penutup yang akan datang akan mampu menunjukkan kualitas yang baik dan penghormatan akan penyelenggaraan debat calon pemimpin negeri ini. Sehingga masyarakat bisa benar-benar yakin untuk melakukan pemilihan terhadap

masing-masing calon,” tegasnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana, mengatakan empat debat calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah berjalan masih belum berhasil mempengaruhi pilihan pemilih mengambang, undecided voters dan swing voters.

Aditya menyebut pemilih yang belum menentukan pilihannya masih menunggu sampai saat-saat terakhir, bahkan sampai seluruh rangkaian debat resmi yang digelar KPU selesai.

“Debat memberi pengaruh iya, tapi beberapa data yang saya lihat undecided voters itu masih tinggi. Artinya banyak yang menanti sampai dua minggu terakhir,” kata Aditya, Senin, 22 Januari 2024.

Menurut Aditya, ketiga pasangan calon masih harus bekerja keras untuk mendapatkan hati undecided voters. Selain maksimal dalam penampilan debat, para kandidat juga harus memaksimalkan masa kampanye,

baik itu langsung maupun secara virtual.

Aditya memprediksi bila pergeseran pemilihan tidak signifikan dalam beberapa hari ke depan, Pilpres akan berlangsung dua putaran. Dari beberapa survei terbaru dari berbagai lembaga kredibel, belum ada paslon yang elektabilitasnya menembus angka 50 persen.

“Saya yakin Pilpres dua putaran. Sulit untuk satu putaran. Kuncinya menurut saya di Jawa Tengah,” ucap Aditya.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, juga menekankan kepada capres-cawapres untuk mengutamakan isu perlindungan pekerja migran Indonesia menyusul salah satu tema debat kelima yang mengangkat soal ketenagakerjaan, teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, dan kesehatan.

“Harapannya adalah satu, pembebasan biaya PMI menjadi komitmen pemerintahan selanjutnya,” kata Benny di El Royal Hotel, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin, 22 Januari 2024.

Benny menambahkan, tekad anak bangsa yang ingin bekerja ke luar negeri dapat meringankan beban pemerintah dalam membuka lapangan kerja. Untuk itu, dia berharap pemerintah dapat memfasilitasi calon pahlawan devisa yang bertekad mengadu nasib di luar negeri.

Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27 yang menyatakan, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan. “Bekerja di luar negeri, mereka berkeinginan menangkap peluang kerja itu,” jelasnya.

Benny mengatakan, tugas pemerintah memfasilitasi anak bangsa yang ingin bekerja di luar negeri lebih mudah dibandingkan kontribusi mereka terhadap pendapatan negara. Dia juga meminta pemerintah menanggung seluruh beban PMI selama dan saat bekerja di negara penempatan.

“Bebaskan biaya penempatan, biaya asuransi BPJS, transportasi, visa, medical check-up dan tiket terbang untuk mereka bekerja ke negara penempatan,” pungkasnya. ●RDO







# JOKOWI TURUN TANGAN PILPRES SATU PUTARAN

**Dalam kurun waktu beberapa bulan menjelang hari pencoblosan, beberapa lembaga survei menyebut Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berpeluang menang satu putaran karena elektabilitasnya sudah di atas 50 persen. Namun, potensi pilpres dua putaran juga masih cukup besar.**

Hasil survei terbaru dari Political Weather Station (PWS) yang dilakukan 21-25 Januari 2024 menunjukkan elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sudah berada di angka 52,3 persen. Dengan angka elektabilitas ini, kemungkinan besar Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran.

Sementara itu, elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta pasangan capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, jauh tertinggal. Dalam survei PWS tersebut, Anies-Cak Imin mencapai 23,3 persen, sedangkan Ganjar-Mahfud di angka 19,7 persen. Sebanyak 6,7 persen responden belum bisa memutuskan pilih pasangan mana atau undecided voters.

“Dengan melesatnya elektabilitas Prabowo-Gibran hingga menembus 52,3 persen, secara matematis peluang untuk menyelesaikan Pilpres 2024 dalam satu putaran saja cukup terbuka lebar,” peneliti senior PWS, Sharazani, dalam rilis hasil survei PWS secara daring, Jumat, 26 Januari 2024.

Selain tren perkembangan elektabilitas, dengan Prabowo-Gibran terus meningkat dan Anies-Cak Imin maupun Ganjar-Mahfud cenderung mandek, menurut Sharazani, terdapat beberapa faktor lain yang makin memungkinkan pilpres dapat berlangsung satu putaran.

Pertama, kata dia, pilpres satu putaran terjadi jika Presiden Joko Widodo turun gunung dan dengan tegas berkampanye untuk Prabowo-Gibran. Hal ini tidak terlepas dari tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi, sehingga setiap pilihan politiknya cenderung diikuti oleh para simpatisannya.

“Kedua, semakin lemahnya dukungan terhadap PDI Perjuangan dan semakin banyaknya migrasi dukun-

gan terhadap Prabowo-Gibran, semakin memperkuat peluang pemilu satu putaran. Ketiga, semakin berkembangnya opini publik yang menghendaki pemilu cukup dilangsungkan satu putaran demi efisien anggaran, kepastian bisnis dan mengakhiri ketegangan politik,” jelas dia.

Meskipun sulit, kata Sharazani, peluang pilpres dua putaran masih bisa terjadi, terutama karena hal-hal berikut ini. Pertama, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi tiba-tiba anjlok dan semakin banyak rakyat yang kecewa terhadap pemerintah.

Kedua, terjadi gejolak ekonomi yang parah yang menyebabkan rakyat banyak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok.

“Ketiga, pasangan Anies-Cak Imin maupun Ganjar-Mahfud tiba-tiba menampilkan strategi kampanye yang luar biasa yang sanggup membius simpati publik luas,” terang dia.

Survei dengan hasil hampir serupa juga diungkap media ekonomi asal Inggris, The Economist, yang menyebut Prabowo-Gibran mendapat dukungan sekitar 50 persen berdasarkan survei yang dilakukan per 16 Januari 2024. The Economist merangkum survei itu dalam artikel berjudul ‘Who will be the next president of Indonesia’ yang dirilis pada Rabu, 24 Januari 2024. Survei tersebut mencoba memantau siapakah calon presiden yang bertarung dan bagaimana dukungan terhadap ketiganya.

“Prabowo 50 persen, Ganjar 23 persen, dan Anies 21 persen, meski terdapat penurunan suara antara periode September

hingga Oktober 2023, tetapi elektabilitas Prabowo terus mengalami kenaikan pada 31 Oktober 2023 hingga Januari 2024,” tulis The Economist.

The Economist juga menggambarkan sosok Prabowo yang jika terpilih sebagai Presiden Indonesia akan meneruskan program Presiden Jokowi.

“Prabowo tidak hanya menganut paham Jokowiomics yaitu pembangunan berbasis infrastruktur, tetapi juga menggandeng putra Jokowi yang berusia 36 tahun, Gibran Rakabuming Raka sebagai pascapengantinya,” tulis The Economist.

Koordinator Nasional Penerus Negeri Prabowo-Gibran, Muhammad Pradana Indraputra, memberikan respons terhadap survei yang dirilis The Economist. Menurut Pradana, survei tersebut menjadi bahan bakar untuk menjemput kemenangan Prabowo-Gibran satu putaran.

“Survei itu sebenarnya bagi kami tidak mengagetkan. Saya rasa survei ini menjadi bahan bakar untuk menjemput kemenangan,” ujar Pradana, Jumat, 26 Januari 2024.

Yang menarik, kata Pradana, The Economist mengungkapkan kenaikan elektabilitas Prabowo-Gibran tidak terlepas dari komitmen keduanya untuk melanjutkan berbagai program Presiden Jokowi. Pradana menilai hal tersebut

sangat penting, apalagi di dunia usaha dalam negeri maupun luar negeri.

“Pasti dapat dibayangkan kalau tiba-tiba setelah 10 tahun, apa yang sudah dibangun begitu sistematisnya infrastruktur yang ada. Lalu begitu juga mengubah konsep perizinan usaha menjadi lebih sederhana karena di era Pak Jokowi ini kan banyak sekali hal-hal yang secara fundamental sudah baik dan akan disempurnakan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran,” tuturnya.

Pradana mencontohkan dalam konteks kredit usaha masyarakat kecil, Prabowo-Gibran akan menyejahterakan kelompok petani, nelayan, peternak dengan berbagai programnya. Lalu dalam konteks investasi, Prabowo-Gibran juga akan memberikan kemudahan berusaha dengan mendukung Undang-Undang Cipta Kerja, serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

“Nah, kita bicara tax holiday dan tax allowance yang diberikan ke pelaku usaha, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Itu semua kan hal-hal yang selama sembilan tahun ini menjadi satu gula-gula, menjadi ketertarikan dunia usaha terutama di luar negeri,” jelas Pradana.

Pradana menambahkan, pihaknya tidak ingin cepat puas dan menjadikan survei tersebut sebagai pemacu semangat untuk bekerja lebih keras lagi memenangkan pasangan Prabowo-Gibran. Jika dilihat dari tren yang ada saat ini, elektabilitas Prabowo-Gibran memang menunjukkan tren yang positif.

“Sudah tipis 47-48 persen elektabilitasnya. Jadi saya rasa survei hari ini menjadi pemicu kita untuk bekerja lebih keras agar bisa menang sekali putaran dan mudah-mudahan nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa membuktikan survei tersebut tidak sembaranganlah,” ungkap Pradana.

Lalu, Skala Data Indonesia (SDI) yang melakukan survei pada 13-21 Januari 2024 menyebut elektabilitas Prabowo-Gibran sebesar 45,7 persen, diikuti Anies-Muhaimin 27,6 persen, dan Ganjar-Mahfud sebesar 16,9 persen. Sedangkan, yang tidak tahu dan tidak menjawab (undecided voters) sebesar 9,8 persen.

“Meski demikian, pemilih swing voters atau pemilih yang masih dapat berubah pilihan sebesar 19,6 persen, sehingga dengan demikian, suara swing voters dan undecided voters sangat menentukan arah pilpres ke depan. Pilpres akan digelar satu atau dua putaran, salah satu variabel yang penting ialah ke mana arah suara swing voters dan undecided voters,” kata Direktur Skala Data Indonesia, Azka Abdi Amrullohi, Jumat, 26 Januari 2024.

•RDO

